

**EVALUASI TERHADAP FISH SANCTUARY DI PANTAI PASIR PUTIH
PRIGI KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:

FATKHURROHMAN AZIS

0410840023



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

**EVALUASI TERHADAP FISH SANCTUARY DI PANTAI PASIR PUTIH
PRIGI KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan Di
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh:

FATKHURROHMAN AZIS

0410840023



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2010

RINGKASAN

FATKHURROHMAN AZIS, Evaluasi terhadap *Fish Sanctuary* di pantai pasir putih Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. (Di bawah bimbingan **Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP**, dan **Dr.Ir. Pudji Purwanti, Mp**)

Penelitian ini di laksanakan mulai tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Perlindungan Laut atau *Fish Sanctuary* Pasir Putih Pantai Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa *Fish Sanctuary* Pasir Putih (FSPP) merupakan salah satu tempat pemulihan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang dimana program ini sudah lama dijalankan serta tempatnya berada pada daerah wisata sehingga menarik untuk di kaji permasalahan yang ada di dalamnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) sejarah perkembangan (FSPP) mulai awal hingga sekarang, 2) sejauh mana partisipasi masyarakat sekitar, wisatawan, dan pengelola terhadap (FSPP), 3) Mekanisme kerja kelembagaan pengelola (FSPP), 4) unit usaha yang ada pada (FSPP), 5) langkah-langkah pengelolaan pada Fish Sanctuary untuk selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan teknik yang digunakan adalah studi kasus. Analisa data yang digunakan adalah Analisis perbandingan pola, pembuatan eksplanasi, dan Analisis deret waktu. Sedangkan tehnik yang digunakan untuk penentuan responden adalah *Snowball sampling technique*.

FSPP berada diteluk Prigi yang terletak di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Posisi kordinat desa Tasikmadu sendiri adalah 8° 17' 43" LS dan 8° 24' 25" LS serta 111° 43' 08" BT dan 111° 45' 08" BT yang memiliki batasan sebagai berikut a) sebelah utara : Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, b) Sebelah selatan : Samudera Hindia, c) Sebelah barat : Desa Prigi Kecamatan Watulimo, dan c) Sebelah timur : Kecamatan Besuki dan Samudera Hindia.

Sejarah dari FSPP dibentuk *Cofish Project* tahun 2001, adalah sebuah lokasi yang memiliki luas 81 ha, dengan sumberdaya yang dilindungi terumbu karang. Di lokasi ini telah ditanam sejumlah 760 buah stupa yang berfungsi sebagai substrat terumbu karang. Latar belakang dibentuknya fish sanctuary pasir putih pada dasarnya adalah berangkat dari permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah Indonesia pada sektor perikanan yang meliputi : 1) isolasi sosial dan kemiskinan masyarakat perikanan pantai, 2) berkurangnya sumberdaya di sekitar pantai. Dari permasalahan tersebut kemudian pemerintah atau Departemen Kelautan dan Perikanan kabupaten Trenggalek membuat penataan Fish sanctuary pasir putih yang merupakan hasil kerja sama antara Fakultas perikanan UB Malang dengan bagian Proyek CO-FISH kabupaten Trenggalek. Naskah kerjasama tersebut tertuang dalam kontrak (SPP) No. 37/SPP/CO-FISH/TGL/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001.

Kondisi fish sanctuary yang memerlukan perbaikan atau yang perlu diganti meliputi kondisi fisik serta kondisi habitat. Untuk keadaan dari fasilitas fisik dari FSPP banyak sekali yang perlu diperbarui maupun diganti, adapun kondisi fisik tersebut meliputi papan pengumuman, kapal wisata, serta tempat pendaratan kapal wisata. Sedangkan untuk kondisi habitat Terumbu alami Nampak mulai pulih, walaupun dibeberapa tempat terlihat telah mengalami pemutihan dan terndam lumpur, namun masih ada harapan kembali apabila sedimentasi, erosi dan limbah yang ada disekitarnya dapat dicegah.

disepakatinya suatu gugus pengelola *Fish Sanctuary* pasir putih yang anggotanya berjumlah 17 orang. Anggota Gugus pengelola terdiri dari perwakilan

masyarakat lokal, PSBK Prigi – Lestari, unsur pemerintahan desa, kecamatan, KORAMIL, POLSEK, Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. System pengawasan ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari system yang telah ada selama ini dan dikenal dengan system SISWASMAS.

Unit usaha yang terdapat pada FSPP sampai saat ini meliputi kapal wisata dan usaha budidaya rumput laut. Untuk kapal yang saat ini akan dibentuknya kelompok kapal wisata guna pemberian asuransi yang diberikan oleh pihak pariwisata, kemudian untuk budidaya rumput laut proses pengerjaannya masih secara individu oleh salah satu dari gugus pengelola.

Langkah-langkah pengelolaan pada FSPP untuk selanjutnya masih terkendala dengan dana yang pernah diajukan oleh pihak DKP Kabupaten Trenggalek kepada pemerintah. Sedangkan harapan dari pengelola FSPP adalah perlu dibentuknya kembali kelompok-kelompok yang baru agar lebih fokus terhadap FSPP.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu penulis dapat menyajikan laporan skripsi yang berjudul "Evaluasi terhadap Fish Sanctuary pantai pasir putih Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur (*studi kasus tentang fish sanctuary pantai pasir putih prigi*)" didalam tulisan ini disajikan pokok bahasan yang meliputi, sejarah perkembangan Fish Sanctuary pasir putih mulai awal hingga sekarang, partisipasi masyarakat sekitar, wisatawan, dan pengelola terhadap FSPP, partisipasi masyarakat sekitar, wisatawan, dan pengelola terhadap FSPP, unit usaha yang ada pada fish sanctuary pasir putih, dan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan maupun kurang tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

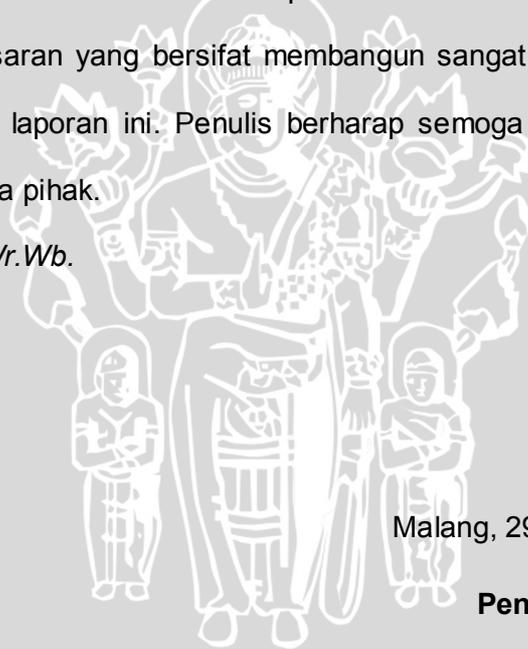
1. Ibu Dr.Ir.Harsuko Riniwati, MP selaku dosen pembimbing I serta Ibu Dr.Ir. Pudji Purwanti, MP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
2. Para responden bapak RT Karanggongso, Bapak Porwanto, serta seluruh masyarakat Karanggongso yang telah membantu saya ucapkan terima kasih

atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan selama penelitian di Prigi.

3. Pegawai DKP, POL AIRUD, dan Dinas Pariwisata atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini.
4. Orang tua dan seluruh seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
5. Rekan-rekan SOSEK '04 serta rekan-rekan GAMBOETA atas diskusi dan tukar informasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Malang, 29 September 2010

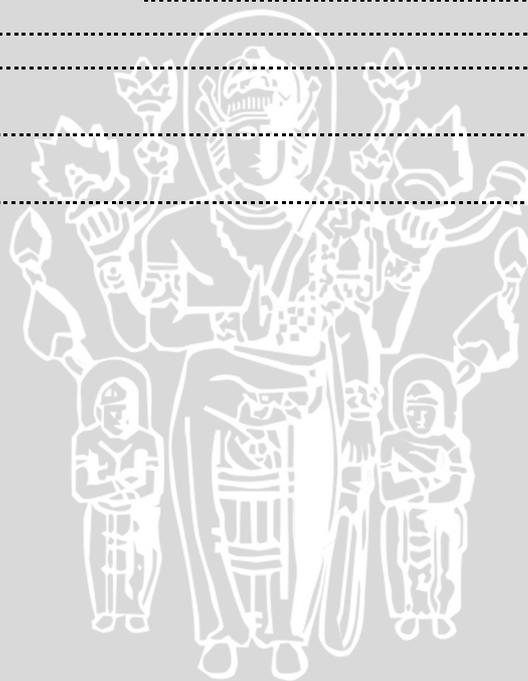
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Keadaan Perairan Tasikmadu dan Fish Sanctuary	9
2.2 Kerangka Dasar	9
2.2.1 Pembangunan berkelanjutan	9
2.2.2 Undang-Undang	11
2.2.3 Kebijakan Pembangunan Perikanan	13
2.2.4 Marine Protected Area (MPA)	14
2.2.5 Fish Sanctuary	16
2.2.5.1 Definisi Fish Sanctuary	16
2.2.5.2 Sejarah Fish Sanctuary Pasir Putih	17
2.2.5.3 Tujuan dan Manfaat Fish Sanctuary	18
2.2.5.4 Sasaran dan Prinsip Fish Sanctuary	20
2.2.5.5 Kelembagaan Pengelola Fish Sanctuary	20
2.3 partisipasi Masyarakat	24
2.4 kerangka Berpikir	26
3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Pengertian Studi Kasus	29
3.2 Jenis Dan Sumber Data	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Penentuan Responden	34
3.5 Analisa Data	35
3.6 Tempat dan Waktu	36
4. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	37
4.1 Geografi Dan Topografi Daerah	37
4.2 Keadaan Penduduk	39
4.3 Keadaan Umum Perikanan	41

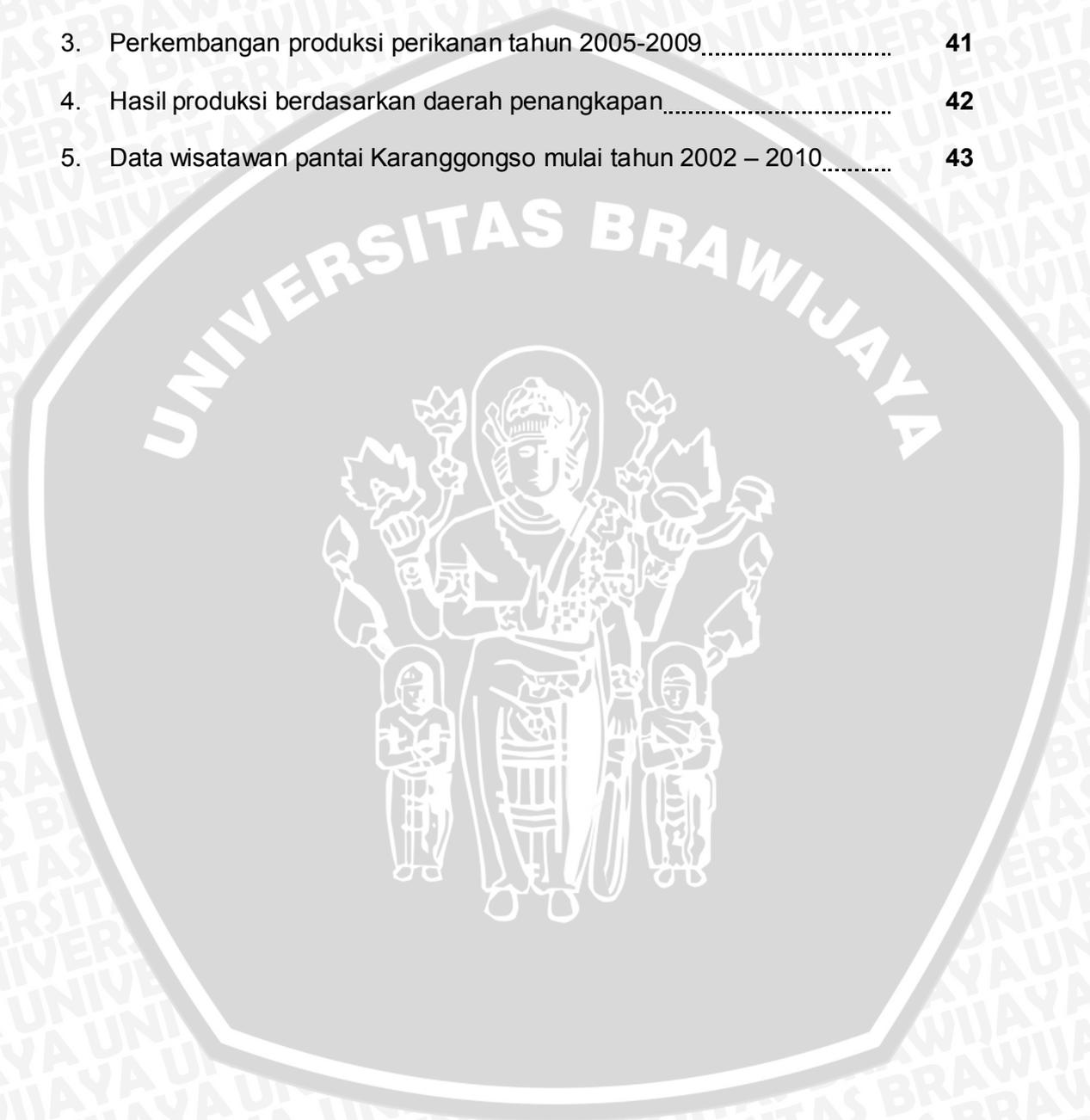


4.4 Keadaan Umum Wisata Pantai Pasir Putih.....	42
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Sejarah Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP)	44
5.1.1 Kondisi Fish Sanctuary Pasir Putih Saat ini (2010).....	51
5.1.1.1 Kondisi Fisik Fish Sanctuary Pasir Putih.....	51
5.1.1.2 Kondisi Habitat FSPP.....	52
5.2 Partisipasi.....	53
5.2.1 Partisipasi Masyarakat.....	54
5.2.2 Partisipasi Wisatawan.....	56
5.3 Mekanisme Kerja Kelembagaan Pengelola <i>Fish Sanctuary</i> Pasir Putih.....	58
5.3.1 Sistem Pengawasan.....	60
5.3.2 Partisipasi Pengelola Fish Sanctuary Pasir Putih.....	62
5.4 Unit Usaha Yang Pada Fish Santuary Pasir Putih (FSPP).....	64
5.4.1 Usaha Yang Berpeluang Untuk Dikembangkan.....	66
5.4.2 Manfaat Fish Sanctuary.....	68
5.5 Langkah Langkah Pengelolaan Selanjutnya	69
6. KESIMPULAN DAN SARAN	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Mata Pencaharian...	39
2. Tingkat Pendidikan tahun 2007.....	40
3. Perkembangan produksi perikanan tahun 2005-2009.....	41
4. Hasil produksi berdasarkan daerah penangkapan.....	42
5. Data wisatawan pantai Karanggongso mulai tahun 2002 – 2010.....	43



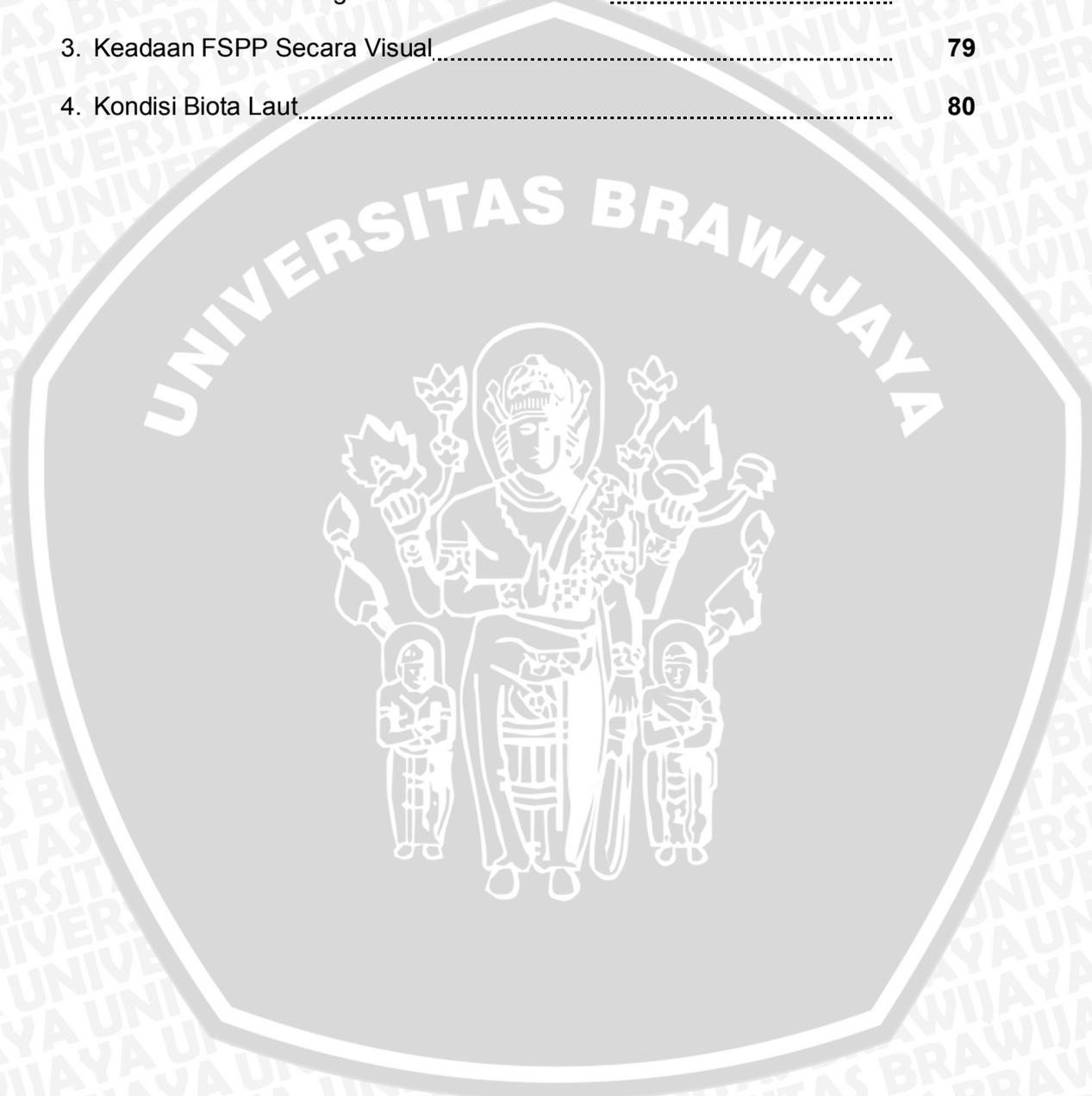
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	28
2. Konfigurasi Fish sanctuary berdasarkan tata ruang peruntukan.....	49
3. Kontruksi tali pembatas.....	51
4. Papan Pengumuman FSPP.....	52
5. Budidaya rumput laut.....	55
6. Mekanisme kerja pengelolaan <i>Fish Sanctuary</i>	60
7. Garis besar prosedur pengawasan dan penyidikan pelanggaran sumber daya.....	61
8. Budidaya rumput laut.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lokasi Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP).....	77
2. Foto udara Pantai Prigi dan Foto Udara FSPP.....	78
3. Keadaan FSPP Secara Visual.....	79
4. Kondisi Biota Laut.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana luas wilayah lautnya lebih besar dari luas daratannya. Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta km² terdiri dari luas daratan 1,9 juta km², laut teritorial 0,3 juta km², sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km². Ini berarti seluruh laut Indonesia berjumlah 3,1 juta km² atau sekitar 62 % seluruh wilayah laut Indonesia (Nontji,1993 dalam Arfian).

Keaneka ragaman hayati laut merupakan sumberdaya alam yang proses pembaharuannya memakan waktu yang cukup lama, sumberdaya tersebut akan terus berkurang dan pada akhirnya akan habis. Pemanfaatan atau eksploitasi sumberdaya perikanan pantai menunjukkan adanya indikasi yang menurun. Hal ini dibuktikan dengan (i) jumlah hasil tangkapan nelayan yang menurun setiap tahunnya; (ii) sebagian besar ikan yang tertangkap belum matang gonad; (iii) ukuran mata jarring yang semakin kecil. Penurunan produksi penangkapan ini diasumsikan karena adanya degradasi lingkungan yang tidak terkendali (laporan Fish Sanctuary Universitas Brawijaya, 2001 dalam DKP Trenggalek).

Faktor utama kerusakan ekosistem pantai yang berakibat pada penurunan produksi perikanan adalah karena ulah manusia. Aktivitas masyarakat disekitar pantai baik disadari maupun tidak disadari telah mengakibatkan ketidak

seimbangan ekologi. Buangan limbah industri rumah tangga dan penebangan tanaman (bakau) disekitar pantai adalah bukti yang paling nyata. Factor tersebut tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah (DKP Trenggalek, 2002)

Sejak tahun 1998 Co-Fish Project yang memiliki tujuan untuk melestarikan sumberdaya alam salah satu proyeknya berada di kabupaten trenggalek antara lain adalah penanaman tumbuhan mangruff yang berada di pantai damas serta serta pembuatan daerah perlindungan laut atau Fish Sanctuary pasir putih (FSPP) yang berada di pantai pasir putih karanggongso Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Fish Sanctuary adalah bagian lingkungan laut yang telah dilindungi oleh unudang-undang negara, suku, teritorial, serta peraturan lokal untuk memberikan perlindungan seutuhnya untuk seluruh suberdaya alam yang ada di didalamnya (http://mpa.gov/all_about_mpa/basics.html). Tujuan dari FSPP tersebut adalah untuk melindungi kawasan pantai pasir putih Karanggongso yang memiliki banyak sekali keaneka ragaman hayati dari kepunahan dan kehancuran yang diakibatkan oleh nelayan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kawasan teluk Prigi yang berada di Selatan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, telah banyak mengalami perubahan, baik pada aspek bio-fisik maupun sosial budaya. Proyek Cofish yang dilaksanakan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2005, salah satu kegiatannya adalah penguatan kelembagaan untuk pengelolaan lokal sumberdaya perikanan (COFISH project, 2003 dalam Susilo). Kegiatan tersebut antara lain: pembentukan daerah perlindungan daerah laut (*fish sanctuary*)

dengan sumberdaya terumbu karang, dan rehabilitasi hutan bakau. Selain itu juga telah telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumberdaya perikanan di Trenggalek (Susilo, 2009).

Pada laporan akhir penyempurnaan dan penataan dan penataan fish sanctuaruy (2002) disebutkan Co-Fish memfasilitasi sebuah kegiatan dengan melakukan sebuah kegiatan dengan melakukan penyempurnaan dan penataan Fish Sanctuary yang bertujuan untuk ; (a) memperbaiki fasilitas utama dan pendukung untuk oprasionalisasi sebuah Fish Sanctuary, (b) meningkatkan gugus pengelola dan keterlibatan masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi Fish Sanctuar, (c) meningkatkan koordinasi dengan pengelola wisata, pemerintah Desa Tasikmadu, dan Perum Perhutani tentang upaya-upaya pengelolaan masa depan pada Fish Sanctuary. Dari berbagai tujuan tersebut diharapkan dapat ; (a) Diperbaikinya pembatas yang rusak dengan tetap menggunakan bahan yang tersisa dan bahan baru dengan bentuk sesuai masukan dari masyarakat, (b) diperbaikinya papan pengumuman Fish Sanctuary, (c) disempurnakannya Fish-Sanctuary sebagai sebuah HGWHP, dengan prinsip ko-manajemen dengan melibatkan pihak Disparlingtamben, perhutani, DKP dan masyarakat residensial dan pemerintah Desa Tasikmadu, (d) direvisinya pengelola Fish Sanctuary, dan (e) Diaktifkannya pos pengawas berikut perlengkapannya untuk melakukan pengawasan Fish Sanctuary da keperluan wisata.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Fish Sanctuary Pasir Putih telah pada tahun 2002 telah mengalami berbagai perbaikan secara fisik maupun non fisik yang bertujuan agar masyarakat sekitar lebih peduli dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati sehingga tidak ada aktifitas penangkapan ikan

dan perusakan terumbu karang, namun sebagai daerah wisata tetap dapat digunakan sebagai areal wisata, terutama di daerah dan pemukiman laut.

Adapun usaha-usaha yang terdapat pada fish sanctuary dibagi menjadi 5 jenis usaha antara lain adalah; (1) wisata bahari yang macam usahanya berupa perahu wisata, (2) barang yang macam usahanya berupa souvenir, (3) makanan yang memiliki macam usaha seperti aneka makanan khas daerah setempat, (4) jasa memiliki macam usaha foto, parker, pandu wisata, dan kegiatan informasi lingkungan dan pariwisata yang bekerja sama dengan dinas pariwisata, (5) budidaya laut yang meliputi keramba ikan kerapu dan udang (DKP, 2002). Dari berbagai usaha tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir

Dari hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2010 kepada Bapak Sutrisno selaku pemilik warung sekaligus pemilik perahu wisata bahwa keadaan FSPP pada saat ini pada dasarnya pengelolaannya masih terkontrol dengan baik namun masih banyak sekali pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat luar karanggongso, pelanggaran itu meliputi penebaran jaring, pemancingan ikan, pengambilan pasir, serta pengambilan batu karang di daerah perlindungan laut. Dari wisatawan juga masih banyak yang belum mengerti tentang daerah perlindungan laut, hal ini terbukti dari masih banyak pelanggaran yang dilakukan, namun pada saat tertentu jika pelanggaran diketahui oleh pihak masyarakat sekitar maka wisatawan itu juga diberi peringatan. Menurut sumber yang telah diwawancarai pihak DKP jika pernah mengontrol daerah perlindungan tersebut namun fasilitas yang sudah rusak atau pelampung pembatas yang rusak masih belum diganti serta tepat pengawasan FSPP yang tidak pernah dimanfaatkan sekarang digunakan dinas pariwisata untuk tempat informasi dan keamanan.



1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari tujuan awal Fish Sanctuary pasir putih yang memiliki tujuan untuk mengelola sumberdaya perikanan serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir pada saat ini tujuan itu oleh masyarakat sering diabaikan karena kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin meningkat, Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat serta wisatawan tentang kelestarian lingkungan sehingga tidak pernah memfikirkan keberlanjutan potensi sumberdaya yang ada pada lingkungan sekitarnya.

Pada dasarnya pengelola fish sentuari memiliki tugas dan kewajiban yang telah ditentukan oleh perda yang mengatur tentang lingkungan hidup, namun pada kenyatannya pengelola Fish Sanctuary pada saat ini tidak terlalu focus pada apa tugas yang telah diberikan kepadanya dikarenakan kesibukan dari masing-masing pengelola yang selain sebagai pengeloa juga meiliki pekerjaan yang tetap, pada saat ini yang sering berpengaruh terhadap FSPP adalah masyarakat sekitar baik pengelola maupu non pengelola.

Pantai pasir putih merupakan daerah pariwisata yang memiliki daya tarik yaitu pada unsur ombak yang tenang dengan air yang cukup jernih serta memiliki pemandangan pantai dengan panorama yang indah dan alami. Peluangnya banyak pengunjung dan koneksitas dengan wisata panai lainnya relative dekat seperti pantai prigi dan pantai damas. Kurangnya dikembangkannya wisata bahari seperti perahu



wisata merupakan kelemahan untuk menarik wisatawan dari daerah wisata tersebut, oleh karena itu apabila kegiatan tersebut dapat dikemas dengan baik maka kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Adanya kelestarian ekologi masyarakat juga akan merasakan nilai ekonominya sebagai akibat dari semakin kondusifnya ekologi di daerah Fish Sanctuary. Dengan adanya nilai ekonomi bagi masyarakat diharapkan masyarakat akan selalu berupaya untuk melakukan monitoring, pengawasan sekaligus menjaga kelestarian (konservasi) sumberdaya perikanan yang ada di daerah tersebut. Dalam upaya untuk menciptakan manfaat ekonomi tetap harus berpedoman pada kelestarian ekosistem, oleh karena itu upaya manfaat ekonomi diarahkan pada ecotourism (wisatawan) dengan 3 sasaran : (1) wisata bahari berjalan, (2) masyarakat berperan dan (3) mempunyai nilai ekonomi.

Namun seiring berjalannya waktu kepedulian dan perhatian masyarakat sekitar terhadap proyek ini semakin lama semakin memudar dan berakibat kerusakan-kerusakan pada daerah serata fasilitas FSPP tersebut, misalnya pada pembatas pembatas yang putus karena terkena baling-baling dari perahu wisata, semakin mudarnya papan pengumuman FSPP dikarenakan kurangnya perawatan, serta kurangnya informasi dan pengawasan terhadap daerah perlindungan tersebut. selain itu faktor yang mempengaruhi kerusakan terhadap daerah perlindungan laut tersebut adalah kurang tahunya para wisatawan tentang daerah perlindungan laut tersebut sehingga para wisatawan seringkali melakukan aktifitas pada daerah larangan tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada ekosistem laut yang ada pada daerah konserfasi, dan dari sini diharapkan kerjasama atau sinkronisasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan

(DKP) dan Dinas Pariwisata setempat untuk saling bekerja sama dalam menjaga lingkungan laut tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sejarah perkembangan Fish Sanctuary pasir putih mulai awal hingga sekarang ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar, wisatawan, dan pengelola terhadap *Fish Sanctuary Pantai Prigi* ?
3. Bagaimana mekanisme kerja kelembagaan pengelola *Fish Sanctuary Pantai Prigi* ?
4. Apa saja unit usaha yang ada pada fish sanctuary pasir putih ?
5. Apa langkah-langkah pengelolaan selanjutnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui :

1. Sejarah perkembangan *Fish Sanctuary pasir putih* mulai awal hingga sekarang.
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat sekitar, dan wisatawan terhadap *Fish Sanctuary Pantai Prigi* .
3. Mekanisme kerja kelembagaan pengelola *Fish Sanctuary Pantai Prigi*.
4. Unit usaha yang ada pada fish sanctuary pasir putih.
5. Langkah-langkah pengelolaan pada Fish Sanctuary untuk selanjutnya.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Pengelola dan Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk evaluasi supaya dapat meningkatkan kinerja dan pengelolaan yang lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus.

2. Peneliti

hasil penelitian dapat digunakan untuk informasi ilmiah guna dilakukan kajian lebih lanjut, sehingga secara tepat dapat memberikan masukan guna kemajuan dalam pembangunan perikanan.

3. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijaksanaan pembangunan pada sub-sektor perikanan terutama dalam upaya pengembangan pelestarian lingkungan pesisir. Pemerintah itu sendiri meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pariwisata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Perairan Tasikmadu Dan Fish Sanctuary

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit terumbu karang. Teluk ini dinamakan teluk prigi yang mempunyai kedalaman 6 – 45 meter. Selain itu teluk Prigi juga memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang sangat berlimpah dan bernilai tinggi, baik secara sosial dan ekonomi. Namun seiring laju pertumbuhan penduduk semakin lama sumberdaya laut tersebut akan semakin terkuras jika tidak ada pembatasan pemanfaatan atau pengelolaan sumberdaya tersebut (Desa Tasikmadu, 2007).

Fish Sanctuary memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat nelayan serta dinas yang terkait. Karena itu untuk tetap menjaga kelangsungan sumberdaya laut maka masyarakat harus bisa berperan serta untuk ikut menjaga serta melestarikan biota laut tersebut agar dapat terus dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang, serta sinkronisasi antara Dinas Pariwisata, dan Dinas Perikanan dan Kelautan harus tetap terjaga agar *Fish Sanctuary* yang berfungsi sebagai tempat pemulihan habitat dalam rangka pelestarian sumberdaya perikanan menjadi lebih optimal.

2.2 Kerangka Dasar

2.2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada pasal satu menyebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara. Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan dimasa depan. Untuk itu tujuan pembangunan di negara berkembang perlu dirumuskan kembali agar transformasi sosial, ekonomi, dan politik dapat terlaksana secara cepat tanpa merusak keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan (Wibawa, S.ed, 1991).

Perkembangan peradapan dan pertumbuhan duni menyebabkan pengelolaan sumberdaya ikan pun semakin kompleks. Apalagi jika dilihat dari konteks negara berkembang seperti indonesia dimana faktor sosial, politik, ekonomi dan demografi yang tidak mendukung menyebabkan pengelolaan perikanan menjadi *the big challenging exercise* bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya (Fauzi, 2005).

Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa ; “Samudera, laut, pulau dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan esensial dari ekosistem bumi yang sangat penting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negara-negara berkembang. Memastikan pembangunan samudera yang berkelanjutan, membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif, termasuk pada tingkat global dan regional, diantara badan-badan yang ber-kepentingan dan tindakan-tindakan di segala tingkatan...” (Trevor W dan Eddi H, 2003 dalam <http://surajis.multiply.com/journal/item/20>).

Dari defini diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perikanan sangat membutuhkan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengontrol sumberdaya perikanan dan supaya sektor perikanan dapat unggulan yang dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

2.2.2 Undang-Undang

Mengingat saat ini sumberdaya alam hayati semakin lama mengalami degradasi atau penurunan yang disebabkan smakin bertambahnya penduduk serta banyaknya pemanfaatan yang hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek yaitu memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun tanpa memperhatikan dampak dimasa yang akan datang. Dengan adanya fenomena semakin menurunnya alam hayati laut tersebut, maka perlu sekali adanya usaha

pengelolaan atau usaha perlindungan laut seperti pembuatan Undang-Undang yang mengatur tentang kelestarian sumberdaya alam.

Adapun beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya.

bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri

- 2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lngkungannya.

- 3) Undang-undang republik indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Wilayah Pesisir.

Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi

pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;

4) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 taHun 2009 Tantang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

Dari berbagi undang-undang di atas diharapkan nantinya menjadi suatu pedoman dalam pengelolaan sumberdaya laut. Selain undang-undang Republik Indonesia masyarakat lokal serta pemerintah membuat kesepakatan untuk membuat aturan guna pembatasan beserta sanksi pelanggaran yang diterapkan bagi Fish Sanctuary. Inti dari peraturan ini adalah semua bentuk kegiatan yang nantinya dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan dari fungsi lingkungan dilarang dilakukan di daerah Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP).

2.2.3 Kebijakan Pembangunan Perikanan

Banyaknya penangkapan ikan secara besar-besaran diperairan Indonesia serta pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak terkontrol pemanfaatannya mempengaruhi turunnya hasil produksi perikanan. Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut maka perikanan di Indonesia tidak akan dapat dinikmati oleh generasi

yang akan data. Dari sini sangatlah diperlukan peran pemerintah untuk melakukan kebijakan pembangunan yang lebih merata.

Disisi lain, dalam pemecahan terhadap keprihatinan tersebut keinginan pelaku perikanan (nelayan, industri dan sebagainya) sering tidak sinkron dengan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang dijalankan oleh pemerintah (Fauzi, 2005). Seharusnya pemerintah memberi kebijakan pada pelaku perikanan supaya perikanan dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan bukannya nelayan harus menjalankan kebijakan pemerintah yang justru membuat nelayan menjadi kurang maksimal dalam memperoleh hasil usahanya.

Adapun tujuan jangka panjang dari kebijakan pembangunan perikanan antara lain adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan (<http://www.kp3k.dkp.go.id>).

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan perikanan masih belum sepenuhnya dapat dicapai oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan.

2.2.4 Marine Protected Area (MPA)

Marine Protected Area (MPA) adalah Daerah Perlindungan Laut yang memiliki tujuan untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam laut mulai dari perikanan serta biota laut yang ada didalamnya supaya pemanfaatnya dapat dikontrol untuk kepentingan yang akan datang. MPA sudah dilakukan diberbagai belahan dunia terutama di perairan laut indonesia. MPA global serta MPA indonesia akan dijabarkan sebagai berikut.

1. MPA Global

Menurut www.conservation.org keberadaan MPA diseluruh dunia mencapai lebih dari 120.000 tempat, hal ini disebabkan karena hilangnya sepecies dan habitat laut yang terus berlanjut. Pengembangan sistem global Marine Protected Area (MPA) masih tertinggal jauh di belakang dari biosfer yang terrestrial baik di tingkat dan efektivitas dari cakupan. Meskipun demikian, semakin jelas bahwa MPA dapat memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi habitat laut, terutama ketika untuk membentuk bagian langkah-langkah dari program lebih luas (<http://www.wri.org/map/marine-protected-areas-world>, 2010).

Negara kecil pulau Pasifik Kiribati telah menjadi pemimpin konservasi global dengan membentuk kawasan perlindungan laut California terbesar di dunia, berukuran samudra belantara yang kaya terumbu karang asli dan populasi ikan terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan iklim.

2. MPA Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat melimpah, namun sumberdaya perikanan tersebut memiliki sifat terbatas dan mudah habis jika pengelolaannya tidak terkontrol dan tanpa adanya perlindungan yang dapat membatasi penangkapan dan pemanfaatannya. KAWASAN PERLINDUNGAN LAUT Membangun paling sedikit 3 Area baru Konservasi Laut Indonesia, minimal satu di setiap ekoregion ada penambahan luas sekurangnya 750.000 ha (di pantai Jamursbamedi, Papua, pulau Derawan - Kalimantan Timur, dan daerah Alor-Solor)(http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/marineprotectedareas/).

Selain yang telah disebutkan di atas Indonesia juga telah memiliki daerah perlindungan laut jumlahnya cukup banyak dan hampir menyebar diseluruh Indonesia. Harapan dari adanya daerah perlindungan laut tersebut adalah supaya sumberdaya perikanan dapat terus terjaga kelestariannya sampai generasi mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan serta masyarakat pesisir.

2.2.5 Fish Sanctuary

2.2.5.1 Definisi Fish Sanctuary

Daerah perlindungan laut atau FSPP adalah kawasan laut dengan segala isinya yang terletak dikawasan Teluk Prigi, dengan batasan fisik yang jelas, dan karena dibutuhkan atas kesadaran sendiri, dilindungi secara bersama oleh masyarakat melalui kesepakatan lokal dan dikuatkan oleh instansi pemerintah yang berwenang (Departemen Kelautan Dan Perikanan,2002)

Fish sanctuary adalah bagian manapun dari lingkungan laut yang telah dilindungi undang-undang federal, negara bagian, suku, teritorial, atau undang-undang atau peraturan lokal untuk memberikan perlindungan tahan lama untuk sebagian atau seluruh sumber daya alam dan budaya di dalamnya (http://mpa.gov/all_about_mpa/basics.html).

Menurut undang-undang No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Daerah *Fish Sanctuary* diharapkan merupakan daerah yang dikeramatkan yang pada dasarnya adalah daerah perlindungan laut yang keberadaannya perlu ditingkatkan aktualisasi dan implementasi dari fungsi *Fish Sanctuary* sebagai daerah perlindungan laut. Dengan demikian dampak yang diakibatkan dengan berfungsinya daerah perlindungan laut akan meningkatkan kondisi habitat di daerah tersebut sehingga fungsi *Fish Sanctuary* sebagai tempat bertelurnya (*Spawning Ground*) dan pembesaran ikan (*Nursery Ground*) serta tempat mencari makanan (*Feeding Ground*) ikan akan semakin kondusif dan pada akhirnya restocking ikan berjalan sesuai yang diharapkan (DKP, 2003).



Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan proses FSPP adalah untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, agar sumberdaya perikanan dapat ditingkatkan dan dipertahankan keberadaan jumlah biota laut secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Selain itu FSPP memiliki fungsi untuk menjaga supaya sumberdaya perikanan tetap menjadi salah satu sumber ekonomi potensial bagi generasi mendatang.

2.2.5.2 Sejarah Fish Sanctuary Pasir Putih

Kesadaran dan inisiatif yang positif dan konstruktif guna mempertahankan kelestarian ekosistem di wilayah pantai. Kesadaran dan inisiatif pelestarian harus muncul dari masyarakat sendiri sebagai sebuah kebutuhan demi keberlangsungan hajat hidup mereka dan cucu nanti. Pemberdayaan masyarakat sekitar di sekitar pantai menjadi tuntutan yang strategis dan tidak bias ditawar lagi. Hal ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan (DKP Trenggalek, 2002).

Kawasan teluk Prigi yang berada di Selatan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, telah banyak mengalami perubahan, baik pada aspek bio-fisik maupun sosial budaya. Proyek Cofish yang dilaksanakan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2005, salah satu kegiatannya adalah penguatan kelembagaan untuk pengelolaan lokal sumberdaya perikanan (COFISH project, 2003 dalam Susilo). Kegiatan tersebut antara lain: pembentukan daerah perlindungan daerah laut (*fish sanctuary*) dengan sumberdaya terumbu karang, dan rehabilitasi hutan bakau. Selain itu juga

telah telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumberdaya perikanan di Trenggalek (Susilo, 2009).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Fish Sanctuary Pasir Putih mulai dibentuk sejalan dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

2.2.5.3 Tujuan Dan Manfaat Fish Sanctuary

Adapun tujuan dan manfaat dari fish sanctuary dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Tujuan

Tujuan dari Fish sanctuary pasir putih ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat konservasi dan perlindungan komunitas hewan dan tumbuhan yang beragam yang ditemukan di darat, pesisir, dan perairan laut.
2. Sebagai tempat untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang ikan beserta kualitas habitat hidupnya.
3. Sebagai tempat perlindungan untuk berkembang biak bagi ikan dan avertebrata yang bernilai ekonomi, sehingga menciptakan sumber pengambilan demi melengkapi daerah pengambilan ikan disekitarnya.
4. Sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, juga sebagai tempat untuk pengembangan wisata alam.

b. Manfaat

Daerah perlindungan laut atau fish sanctuary berbasis masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti memberikan tambahan sumber pendapatan dari peningkatan produksi perikanan dan dari sector pariwisata. Kelemahan daerah perlindungan laut ini adalah manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang atau lama. Selain itu daerah perlindungan laut berbasis masyarakat ini berfungsi sebagai upaya konservasi dengan adanya perbaikan kualitas sumberdaya alam seperti terumbu karang. Manfaat tambahan lainnya adalah peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat yang lebih besar atau meningkatkan dalam mengelola sumberdaya alam. Pelaksanaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dalam jangka panjang lebih efektif dari segi biaya dan lebih langgeng sifatnya (Fedi,2000 dalam Rahayu).

2.2.5.4 Sasaran dan Prinsip Fish Sanctuary

a. sasaran

Sasaran yang ingin di capai dari pelaksanaan FSPP adalah :

- Keseimbangan antara jumlah stok yang tersedia dengan jumlah yang boleh di manfaatkan secara lestari.
- Terpeliharanya sumberdaya, habitat dan lingkungan dalam mendukung keberadaan dan keberlanjutan sumberdaya ikan.

- Kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna sumberdaya alam (Fakultas Perikanan, 2000 dalam Rahayu).

b. Prinsip

Prinsip fish sanctuary atau pedoman teknis untuk wilayah lindungan adalah sebagai berikut :

- Wilayah lindungan harus merupakan zona yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali (tidak boleh ada pengambilan sumberdaya laut berupa apapun).
- Wilayah lindungan harus melindungi lokasi pemijahan jenis-jenis yang dijadikan sasaran penangkapan.
- Pemanfaatan areal disekitar wilayah lindungan harus dibatasi sebagai daerah penangkapan masyarakat setempat (Coremap, 2000 dalam Rahayu)

2.2.5.5 Kelembagaan Pengelola Fish Sanctuary Pasir Putih

1. Gugus Pengelola

Dalam setiap proyek usaha pasti ada suatu kelembagaan pengelolaan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pada Fish Sanctuary pasir putih ini kelembagaan pengelolaan yang berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Trenggalek No. 188.45/416.060/2002 tentang penetapan gugus pengelola daerah perlindungan laut (Fish Sanctuary) meliputi:

- a) Perwakilan Masyarakat
- b) Kelompok PSBK
- c) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

- d) Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Trenggalek
- e) Polsek Watulimo
- f) Camat Watulimo
- g) Kepala Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo.

sedangkan susunan kepengurusan gugus pengelola daerah perlindungan laut (fish sanctuary) kabupaten trenggalek pada tahun 2002 yaitu :

1. kordinator
 - a. Dinas Kelautan Dan Perikanan
 - b. Perwakilan masyarakat Dusun Karanggongso.
2. sekretaris
 - a. Kelompok PSBK Prigi Lestari
3. Anggota
 - a. Perwakilan masyarakat dusun karanggongso
 - b. Perwakilan kelompok nelayan jaring tarik
 - c. Perwakilan kelompok nelayan pemancing
 - d. Perwakilan kelompok perahu wisata pasir putih
 - e. Perwakilan kelompok nelayan penyelam
 - f. Perwakilan kelompok nelayan pencari udang
 - g. Ketua RT Pasir Putih Dusun Karanggongso
 - h. Kepala Dusun Karanggongso
 - i. Kepala Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
 - j. Camat Watulimo
 - k. Polsek Watulimo

- I. Koramil watulimo
- m. Dinas pariwisata

2. Kewenangan

wewenang gugus pengelola berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Trenggalek No. 188.45/416.425.060/2002 yaitu:

- a. menerapkan penegakan segala ketentuan yang tertuang dalam aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut Pasir Putih Teluk Prigi;
- b. memberikan penjelasan dan peringatan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali;
- c. menerapkan sanksi denda material kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran setelah melalui peringatan;

keputusan yang dikeluarkan oleh gugus pengelola berdasarkan SK Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Trenggalek bukan merupakan keputusan final, artinya keputusan ini bias ditentang masyarakat tanpa ada sanksi pemberat, sehingga keputusan gugus pengelola tidak mempunyai kekuatan untuk menerapkan sanksi dilapangan. Artinya kekuatan sanksi gugus pengelola hanya dalam kesepakatan saja, tidak berwibawa secara hukum.

Ketidak wibawaan gugus pengelola berakibat pada penerapan sanksi yang tidak tegas. ketidak tegasan sanksi akan menyebabkan pelanggaran kesepakatan tidak mendapat "*punishment*" ketika melakukan pelanggaran. Tidak adanya *punishment*, berarti kesepakatan yang dibuat tidak berjalan efektif (DKP Trenggalek,2003).

3. Kewajiban

Keajiban gugus pengelola berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Trenggalek ialah :

- a. Mencatat dan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut Pasir Putih Teluk Prigi.
- b. Mencatat identitas atau nomor KTP dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dari aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut Pasir Putih Teluk Prigi.
- c. Melaporkan kepada aparat pengawas terdekat seperti PPNS, Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Pelabuhan Dan Perikanan, Satpol Airud atau kepala inspeksi perikanan, jika pelanggar tidak mengindahkan aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut Pasir Putih Teluk Prigi.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah daerah melalui kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Trenggalek(DKP Trenggalek ,2003).

4. Mekanisme Kerja

Gugus pengelola hanya berwenang menangani pelanggaran terhadap aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut pasir putih teluk prigi, dengan member peringatan atau denda material. Penanganan pelanggaran diluar aturan kesepakatan pengelola daerah perlindungan laut (Fish Sanctuary) Pasir Putih Teluk Prigi tidak diatur, seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu Pol Airud, atau Polsek untuk ditangani sesuai dengan hokum acara pidana. Pelanggaran diluar kesepakatan, umumnya termasuk tindak pidana, misalnya pelanggaran

terhadap harta dan jiwa. dalam SK keputusan gugus pengelola bukan sebagai keputusan final, hal ini menyebabkan gugus pengelola tidak berwibawa, karena tidak punya wewenang menangani pelanggar yang menolak keputusan gugus pengelola (DKP Trenggalek,2003).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurangnya aturan yang dapat memberikan wewenang atau kuasa kepada pengelola untuk dapat menerapkan atau memberi sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang memberikan pelanggaran terhadap keberlangsungan FSPP.

2.3 partisipasi Masyarakat

Secara etimologis kata “partisipasi” berasal dari bahasa latin partisipare yang artinya bagian atau turut serta. Pengertian pengertian partisipasi menurut sastropoetra (1988), adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Alastraire White, juga dalam Sastropoetro (1988), mengartikan partisipasi sebagai suatu keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek pembangunan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dimana tidak dapat berdiri sendiri atau hidup sendiri, karena manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan serba lemah dan kekurangan sehingga dalam hidupnya manusia harus saling berdampingan dengan manusia lainnya. Selain itu manusia juga tergantung dengan alam lingkungannya . hal ini berarti manusia merupakan makhluk yang terbatas atau

mahluk yang tidak sempurna yaitu yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itulah manusia dilahirkan hidup bermasyarakat.

Menurut Mac Iver dan Page (dalam Soekanto,1990) berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu system dalam kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan golongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social.

Selain itu ada yang mendefinisikan masyarakat sebagai golongan besar dan kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain (Sadly, 1983).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP) sangat bergantung pada kepedulian masyarakat, karena fish sanctuary pada akhirnya hasilnya juga akan dinikmati oleh masyarakat. Pada proyek FSPP masyarakat juga diwajibkan memberikan andil dalam setiap kegiatan berjalannya FSPP.

Menurut laporan Rahayu 2003, partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan proyek Perlindungan Laut pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah cukup baik. Dimana partisipasi masyarakat yang dilakukan pada tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk riil berupa: mengikuti pertemuan penyuluhan FSPP, memberikan informasi dan memberikan usulan dan saran yang bersifat membangun, serta ikut mensosialisasikan FSPP. bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan pada tahap pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga keahlian. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung

pelaksanaan kegiatan FSPP pada tahap pelestarian dan pengawasan masih kurang, walaupun sudah ada bentuk partisipasi yang terlihat seperti kemauan masyarakat untuk dijadikan anggota gugus pengelola, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. meskipun partisipasi sudah sedikit menampakkan adanya kepedulian terhadap laut tetapi masih sebatas mendukung (*behavior*) belum sampai pada kesadaran mutlak (*conduct*).

2.4 kerangka Berpikir

Dari fenomena yang terjadi sekarang ini, sumberdaya alam kita sudah menunjukkan adanya gejala degradasi lingkungan. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada seperti saat ini keberadaan atau kondisi terumbu karang dan bakau yang ada diberbagai wilayah kabupaten trenggalek yaitu didaerah Karang Malang, Watu Bentis, Karanggongso, Pasir Putih, Nrumpukan, dan Wonojoyo dari 11 hektar area terumbu karang kondisinya bias dikategorikan kurang baik. Dari lima daerah tersebut hanya dua daerah saja yang penutupan karangnya lebih dari 60% yaitu daerah Bentis dan Karanggongso serta Wonojoyo, sedangkan daerah lainnya penutupan karangnya kurang dari 40%. Untuk kondisi bakaunya sekitar 81 hektar area bakau dalam keadaan rusak. Area bakau ii meliputi daerah Pancar Ngemplak, Pancar Cengkrong, dan Pancar Bang(Rahayu, 2003).

Penyebab kerusakan sumberdaya alam ini dapat dibagi menjadi dua yaitu dari factor alam dan factor manusia. Contohnya dari factor alam, kerusakan terumbu karang bias disebabkan oleh factor fisik (karena badai, gempa bumi, perubahan cuaca, pasang surut), factor kimia (karena adanya bahan kimia yang merusak: pestisida, detergen) dan yang terakhir adalah factor biologis (karena penyakit).

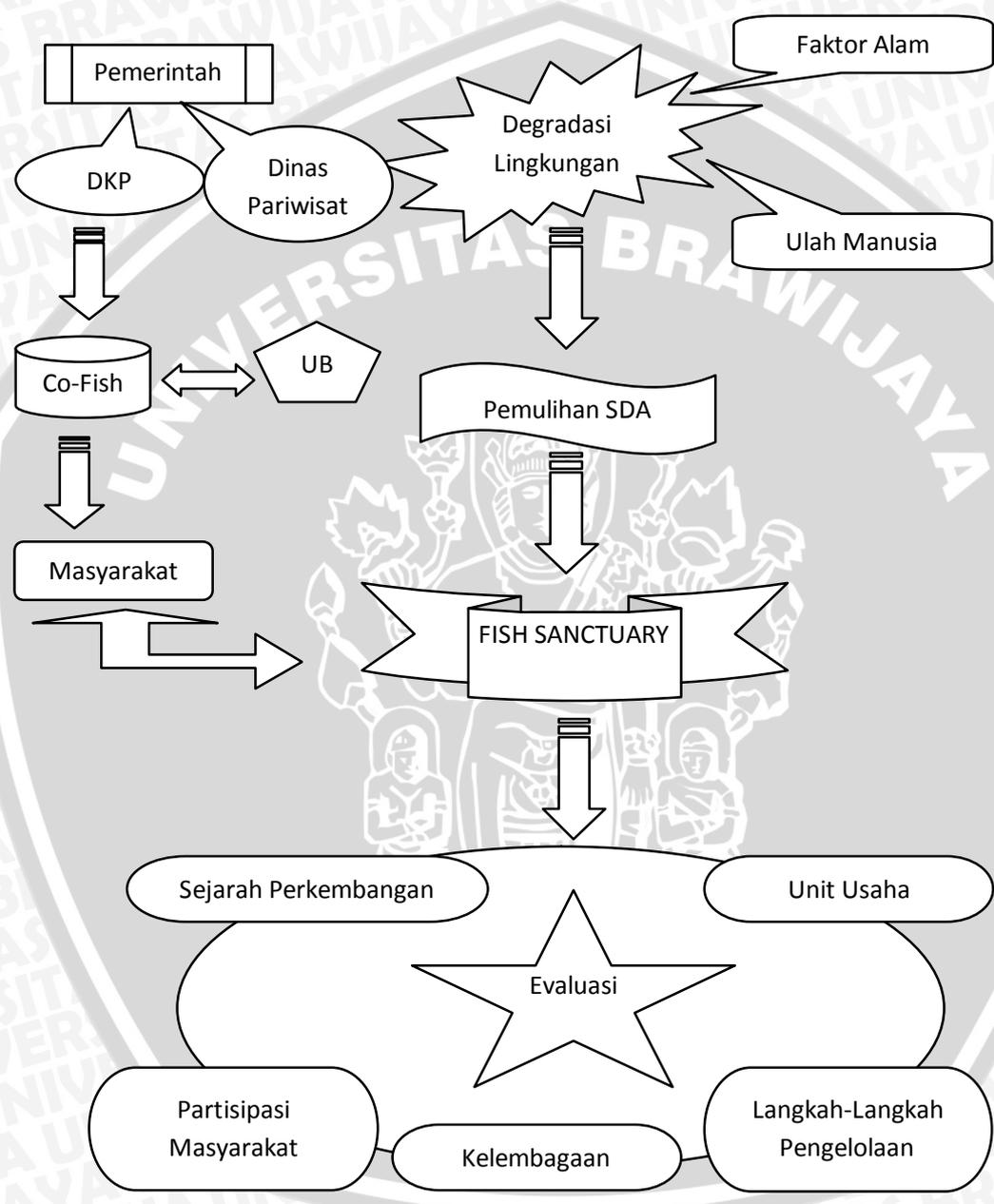
Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh factor manusia seperti pengambilan

terumbu karang, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti, dengan menggunakan bahan peledak, dan putas. Hal ini menunjukkan adanya gejala degradasi norma sosial yaitu menurunnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Salah satu dampak yang terjadi karena perusakan-perusakan sumberdaya alam tersebut adalah semakin menurunnya stock ikan dan semakin sulitnya menangkap ikan disbanding dengan masa lalu.

Melihat kenyataan yang ada tersebut, maka usaha pemulihan sumberdaya alam sangatlah perlu. Untuk itu Dinas Kelautan Dan Perikanan menunjuk Co-Fish sebagai mediator untuk mengadakan usaha perlindungan dan pengkayaan sumberdaya alam (*Fish Sanctuary*) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempetahankan keberadaan stok sumberdaya perikanan yang berkelanjutan atau lestari. Sedangkan sebagai pelaksananya adalah masyarakat sekitar daerah perlindungan laut.

Berdasarkan pola kerangka pemikiran tersebut sebenarnya hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau mengetahui sejauh mana perkembangan FSPP mulai dari kelembagaannya serta partisipasi masyarakat dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atas dibentuknya FSPP, selain itu peneliti juga untuk mengetahui apa saja usaha yang dibentuk masyarakat dengan adanya FSPP tersebut. Semua kegiatan diatas mempunyai satu tujuan yaitu agar tujuan dibentuknya Fish Sanctuary dapat terlaksana dengan baik seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Studi Kasus

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah study kasus. Studi kasus menurut Yin (2008) adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.

Study kasus sendiri dibagi menjadi dua, antara lain adalah :

a) Studi Kasus Tunggal

Studi kasus tunggal merupakan desain umum bagi penyelenggaraan studi kasus, studi kasus sendiri memiliki dua tipe yaitu kasus-kasus yang menggunakan unit analisis holistik dan kasus-kasus yang menggunakan unit analisis terjalin. Secara keseluruhan, desain studi kasus bisa dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu antara lain, (a) kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang ada, (b) merupakan suatu peristiwa yang langka atau unik, atau (c) berkaitan dengan tujuan penyingkapan. Tahap penting dalam pendesainan dan penyelenggaraan kasus tunggal adalah menentukan unit analisis (atau kasus itu sendiri). Definisi yang operasional dibutuhkan, dan beberapa tindakan pemecahan harus diambil sebelum kesepakatan penuh terhadap kesiapan terhadap studi kasus tersebut dicapai guna meyakinkan bahwa kasus tersebut memang relevan dengan isu dan pertanyaan fokus penelitiannya (Yin, 2008).

b) Studi Kasus Multikasus

studi kasus multikasus adalah merupakan penelitian yang mungkin berisi lebih dari sebuah kasus tunggal. Penggunaan desain-desain multi kasus hendaknya mengikuti logika replika, bukan logika sampling, dan dan mengharuskan peneliti untuk memilih kasusnya secara hati-hati. Kasus-kasus tersebut hendaknya berperan seperti pada eksperimen ganda, memiliki hasil yang sama (replika literal) atau hasil yang bertentangan (replika teoritis) dengan yang diprediksikan secara eksplisit pada awal penelitiannya (Yin, 2008).

Dari kedua studi kasus tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal karena dalam penelitian ini terfokus pada fish sanctuary saja.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan jenis data sekunder adalah data yang cara pengumpulannya dilakukan secara tidak langsung, tetapi diambil dari laporan – laporan, jurnal penelitian, majalah maupun bahan kepustakaan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

Jenis data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

- Keadaan umum FSPP
- Keadaan geografis wilayah
- Keadaan penduduk

- Keadaan potensi wilayah.

Sumber yang dimaksud yaitu sumber-sumber yang dapat dijadikan informasi, sumber data yang diperoleh berdasarkan informasi dan permasalahan yang telah didapat dari tempat penelitian dan menjadi pusat perhatian peneliti.

Sumber dari data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan :

- Masyarakat sekitar lokasi FSPP atau masyarakat sekitar pantai pasir putih. Masyarakat ini meliputi : para nelayan, penyedia jasa prahu wisata, pemilik warung yang berada disekitar pantai pasir putih, dan masyarakat yang terjun langsung dalam pengelolaan FSPP.
- Wisatawan yang sedang berwisata disekitar lokasi FSPP.
- Organisasi-organisasi yang terkait dengan FSPP.
- Para pemuka masyarakat Tasikmadu yang terkait dengan FSPP.

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencatat data yang bersumber dari :

- Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten trenggalek
- Kantor Kelurahan Tasikmadu
- Perpustakaan fakutas perikanan dan perpustakaan universitas brawijaya
- Internet.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah: dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi. Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Dokumentasi Dan Rekaman Arsip

Untuk study kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. *Pertama*, dokumen membantu memverifikasikan ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan bukannya mendukung, penelitian mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. seorang peneliti dapat mulai mengajukan pertanyaan baru tentang komunikasi dan jaringan kerja suatu organisasi. Namun begitu, inferensi-inferensi ini harus diperlukan hanya sebagai temuan definitive, sebab inferensi ini pada suatu saat bias menghasilkan arah yang keliru (Yin, 2008).

Dalam penelitian ini dokument-dokument yang dibutuhkan untuk meneliti lebih jauh tentang FSPP yaitu meliputi proposal proyek, laporan sementara dan kertas-kertas kerja, naskah dan cetakan lengkap, serta upaya mengabadikan sumber data yang dianggap dapat menunjang berlangsungnya penelitian.

Rekaman arsip ini dapat digunakan bersama-sama dengan sumber-sumber informasi yang lain dalam pelaksanaan studi kasus. Namun demikian, tak seperti bukti dokumenter, kegunaan rekaman arsip akan bervariasi pada satu study kasus dan lainnya. Pada beberapa penelitian, rekaman tersebut begitu penting sehingga

bisa menjadi obyek perolehan kembali dan analisis yang luas. Pada penelitian-penelitian lainnya, rekaman hanya sepintas relevansinya (Yin, 2003).

Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi, dalam penelitian ini rekaman arsip yang akan dicari guna kelengkapan penelitian antara lain adalah :

- Rekaman keorganisasian pengelola, seperti seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu.
- Rekaman pelanggaran yang terjadi pada kawasan Fish Sanctuary Pasir Putih.
- Peta dan bagan karakteristik geografis FSPP.
- Daftar nama komoditi yang relevan pada FSPP.
- Rekaman-rekaman pribadi, seperti buku harian, dan kalender kerja atau kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi secara langsung dengan jalan tanya jawab dengan responden. Wawancara merupakan Salah satu sumber informasi yang paling penting dalam studi kasus. Karena informan-informan seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Merekatak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan (Yin, 2008).

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dalam penelitian tentang FSPP meliputi kegiatan wawancara tentang :

- Sejarah perkembangan FSPP mulai awal hingga sekarang.

- Se jauh mana pengetahuan masyarakat sekitar, wisatawan, dan pengelola terhadap *Fish Sanctuary Pantai Prigi*.
- Peran serta masyarakat terhadap FSPP.
- Mekanisme kerja kelembagaan pengelola *Fish Sanctuary Pantai Prigi*.

3. Observasi

Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan observasi partisipan. Observasi langsung adalah dengan membuat kunjungan langsung terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Yang berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Sedangkan observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2008). Dalam lingkungan masyarakat pesisir misalnya, peran ini bisa dilakukan melalui interaksi sosial umum dengan berbagai lapisan penduduk hingga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan fungsional khusus dalam lingkungan sosial yang bersangkutan.

3.4. Penentuan Responden

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam penentuan responden adalah *Snowball sampling technique*. Pengambilan sampel dengan teknik *snowball sampling technique* gambarannya seperti menggelindingkan bola salju dari bukit ke lembah atau ke bawah. Bola yang digelindingkan hanya sekepalan tangan. Pada ketika menggelinding itu, ada salju yang ikut menempel ke bola sekepal tadi. Makin ke bawah jadinya makin banyak salju yang menempel, dan makin membesarlah bola

salju tersebut.. Di ketika populasi penelitian tidak jelas keberadaannya, dan tidak pasti jumlahnya, temuan satu sampel saja sudah sangat amat berarti. Dari sampel pertama itu dicarilah (diminta informasinya) mengenai “teman-teman” sampel lainnya. Jadi definisi dari *Snowball sampling technique* adalah teknik pengambilan sampel dari **populasi yang tidak jelas keberadaaan anggotanya dan tidak pasti jumlahnya** dengan cara menemukan satu sampel, untuk kemudian dari sampel tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan sampel (sampel-sampel) lain, terus demikian secara berantai (Amirin, 2009).

Penentuan responden pada penelitian difokuskan pada semua lapisan masyarakat yang terlibat langsung dengan FSPP yang meliputi :

1. unsur pemerintah

- a. Kepala Desa Tasikmadu
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek
- c. Dinas pariwisata Kabupaten Trenggalek
- d. Kepala Dusun Karanggongso
- e. Ketua RT Pasir Putih

2. Unsur Masyarakat

- a. Perahu wisata
- b. Warung-warung Pasir Putih
- c. Wisatawan

3.5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dominan, yang meliputi :

1. Perjodohan Pola

Menurut Yin (2008), Perjodohan pola merupakan perbandingan antara pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan (dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada bersamaan, hasilnya akan menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Jika studi kasus yang bersangkutan eksploratoris, polanya akan berkaitan dengan variabel-variabel dependen atau independen dari penelitian yang bersangkutan (ataupun keduanya). Jika studi kasus tersebut deskriptif, perjodohan pola akan relevan dengan pola variabel-variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan datanya.

2. Pembuatan Eksplanasi

Tujuan dari pembuatan eksplanasi adalah menganalisa studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Prosedur tersebut pada dasarnya relevan untuk studi kasus eksplanatoris. Prosedur tersebut, bagi studi kasus eksplanatoris, umumnya dipandang sebagai bagian dari proses

pengembangan hipotesis (Gleser dan Strauss, 1967 dalam Yin), namun tujuannya bukan untuk menyimpulkan suatu penelitian melainkan mengembagkan gagasan-gagasan untuk penelitian selanjutnya (Yin, 2008).

3. Analisis Deret Waktu

Desain deret waktu merupakan hasil penelitian yang mengurutkan tentang permasalahan yang timbul dari awal sampai saat ini. Desain deret waktu bisa lebih kompleks bila kecenderungan dalam suatu kasusnya dipostulasikan lebih kompleks. Seorang bisa mempostulasikan, misalnya, tidak hanya kecenderungan meningkat atau menurun, tetapi beberapa peningkatan yang diikuti oleh beberapa penurunan didalam kasus yang sama (Yin, 2008).

Dari ketiga analisis tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deret waktu, karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perkembangan suatu proyek pelestarian lingkungan yaitu pelestarian lingkungan laut atau Fish Sanctuary.

3.6 Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan di laksanakan mulai tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Perlindungan Laut atau Fish Sanctuary Pasir Putih Pantai Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Geografi Dan Topografi Daerah

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat $8^{\circ} 17' 43''$ LS dan $8^{\circ} 24' 25''$ LS serta $111^{\circ} 43' 08''$ BT dan $111^{\circ} 45' 08''$ BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 37 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 248,61 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Desa Prigi Kecamatan Watulimo
- Sebelah timur : Kecamatan Besuki dan Samudera Hindia

Secara umum kondisi topografis Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter diatas permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu.

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan teluk Prigi yang mempunyai kedalaman 6 - 45 meter.

Sungai-sungai di wilayah Kecamatan Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata 27° C dengan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo 27,0 mm per tahun.

Iklim di wilayah Kecamatan Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan April.

Kawasan teluk prigi secara keseluruhan mempunyai luas ± 8.900 ha. Sedang fish sanctuary sendiri berada di pantai pasir putih dusun Karanggongso yang memiliki luas daerah perlindungan yaitu 81 ha. dengan kesepakatan lokasi ini maka 0,91 % dari wilayah perairan Prigi sudah dilindungi dan diharapkan akan menjadi sumber pemulihan stock perikanan dan habitat pantai Prigi



4.2 Keadaan Penduduk

Desa Tasikmadu mempunyai jumlah penduduk sampai tahun 2009 sekitar 7.565 orang. Komposisi jumlah penduduk desa Tasikmadu berdasarkan mata pencaharian dapat disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
Petani	974	16,67
Buruh tani	1.356	23,23
Buruh/swasta	510	8,73
Pegawai negeri	125	2,14
Pengrajin	110	1,88
Pedagang	545	9,32
Nelayan	2.045	35,00
Montir	10	0,17
Tukang batu	55	0,94
Tukang kayu	112	1,91
TOTAL	5.842	100%

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, 2009

Komposisi jumlah penduduk desa Tasikmadu berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 2 :

Tabel 2. Tingkat Pendidikan tahun 2007

Pendidikan	Jumlah
Usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	9 Orang
Tidak tamat SD/ sederajat	78 Orang
Tamat SD/sederajat	3.255 Orang
Tamat SLTP/sederajat	2.883 Orang
Tamat SLTA/sederajat	2.582 Orang
Tamat D-1	4 Orang
Tamat D-2	5 Orang
Tamat D-3	9 Orang
Tamat S-1	97 Orang
Tamat S-2	2 Orang
Tamat S-3	1 Orang
TOTAL	6.625 Orang

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, 2007

Berdasarkan data diatas sebagian besar penduduk Tasikmadu tamat SD sebanyak 3.255 orang sehingga kurang mampu diajak untuk berkembang dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya perikanan di Prigi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Sebagian besar penduduk Desa Tasikmadu berlatar belakang suku Jawa. penduduk Tasikmadu juga terdiri dari beberapa etnis selain etnis Jawa, yaitu etnis Madura dan etnis Bugis. Adanya berbagai macam etnis ini dikarenakan banyaknya pekerja dari luar yang menjadi nelayan di Prigi, khususnya Desa Tasikmadu.

4.3 Keadaan Umum Perikanan

Dari data yang diambil dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diketahui bahwa pada tahun 2009 produksi perikanan yang didaratkan adalah 23.571.671 kg atau 64.580 kg perhari. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 maka jumlah produksi perikanan tahun 2009 mengalami penurunan 10,56% atau 2.783.329 kg. Penurunan ini disebabkan karena musim paceklik/laiib yang cukup panjang, cuaca yang kurang baik dan musim ikan terjadi hanya pada bulan Juli sampai dengan november. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Perkembangan produksi perikanan tahun 2005-2009

No.	Tahun	Volume (kg)	Keterangan
1	2005	14.346.000	-
2	2006	23.603.000	Naik 64,53%
3	2007	22.332.000	Turun 5,38%
4	2008	26.355.000	Naik 18,01%
5	2009	23.571.671	Turun 10,56%

Sumber : Laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 2009

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi perikanan di pantai Prigi setiap tahunnya cenderung tidak stabil, hal ini akan berakibat pada ekonomi masyarakat pesisir yang mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan.

Selama tahun 2009 hasil produksi berdasarkan daerah penangkapan yang terbesar adalah berada di perairan Teluk Prigi ($8^{\circ}27'20''\text{LS}/111^{\circ}43'20''\text{BT}$). Hasil produksi dari masing-masing perairan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil produksi berdasarkan daerah penangkapan

Bulan	Perairan Prigi (kg)	Perairan Tulungagung (kg)	Perairan Pacitan (kg)	Perairan Blitar (kg)	Perairan Sadheng (kg)	Jumlah (kg)
Januari	211.110	121.400	27.110	8.180	0	367.800
Februari	165.150	50.720	21.380	1.170	0	238.420
Maret	287.860	174.630	31.290	17.500	19.420	530.700
April	449.140	279.470	47.660	23.650	28.210	828.130
Mei	289.750	210.110	71.540	40.150	48.240	659.790
Juni	179.859	142.738	62.559	32.462	44.764	462.382
Juli	637.236	617.607	76.117	35.673	49.269	1.451.902
Agustus	3.008.325	2.248.092	90.630	43.739	58.313	5.449.099
September	2.083.511	1.426.760	56.093	27.007	34.091	3.627.462
Oktober	2.797.996	2.318.013	58.392	28.374	37.714	5.240.489
November	2.194.667	1.623.662	48.005	25.041	30.091	3.921.466
Desember	438.558	338.172	10.420	-	6.881	794.031
Jumlah (kg)	12.779.162	9.551.374	601.196	282.946	356.993	23.571.671

Sumber : Laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi yang terbesar adalah dari daerah penangkapan perairan Teluk Prigi yaitu sebesar 12.779.162 kg atau 54,21 %. Didaerah prigi rata-rata penangkapannya menggunakan pukat cincin dengan produksi utamanya ikan layang, lemuru, tongkol, cakalang, slengseng, dan peperek.

4.4 Keadaan Umum Wisata Pantai Pasir Putih

Daerah wisata pantai Pasir Putih Merupakan daerah obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari pada obyek wisata lainnya yang berada di Kabupaten Trenggalek, data pengunjung atau wisatawan pantai Pasir putih mulai tahun 2002-2010 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 5. Data wisatawan pantai Karanggongso mulai tahun 2002 – 2010

Tahun	Jumlah Wistawan (jiwa)
2002	68.995
2003	43.626
2004	77.486
2005	52.027
2006	60.603
2007	105.976
2008	136.535
2009	195.241
2010*	66.798
Total	807.317

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek

* 2010 Penghitungan mualai bulan Januari – Bulan Mei

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan yang berkunjung di Pantai Pasir Putih setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2010 saja yang dihitung mulai bulan Januari sampai bulan Mei saja Pengunjung sudah mencapai 66.798 orang.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sejarah Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP)

Pada laporan akhir DKP (2003) Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP) dibentuk *Cofish Project* tahun 2001, adalah sebuah lokasi yang memiliki luas 81 ha, dengan sumberdaya yang dilindungi terumbu karang. Di lokasi ini telah ditanam sejumlah 760 buah stupa yang berfungsi sebagai substrat terumbu karang. Latar belakang dibentuknya fish sanctuary pasir putih pada dasarnya adalah berangkat dari permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah Indonesia pada sektor perikanan yang meliputi : 1) isolasi sosial dan kemiskinan masyarakat perikanan pantai, 2) berkurangnya sumberdaya di sekitar pantai. Dari permasalahan tersebut kemudian pemerintah atau Departemen Kelautan dan Perikanan kabupaten Trenggalek membuat penataan Fish sanctuary pasir putih yang merupakan hasil kerja sama antara Fakultas perikanan UB Malang dengan bagian Proyek CO-FISH kabupaten Trenggalek. Naskah kerjasama tersebut tertuang dalam kontrak (SPP) No. 37/SPP/CO-FISH/TGL/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001.

Pada dasarnya pemerintah trenggalek mempunyai kewenangan sebagai institusi untuk mengelola sumberdaya perikanan pantai Prigi seperti yang diamanatkan dalam UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (*Top-Down Planing*). Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) melalui PERDA No. 12/2000 dan SK Bupati Trenggalek No. 61/2001. UU No. 22/1999 juga menyatakan bahwa segala bentuk pemanfaatan sumberdaya harus mendapatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal (*Bottom-Up Planing*). Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan Pantai Prigi pada dasarnya

harus dilakukan bersama secara dinamis antara masyarakat lokal (*Bottom-Up*) dengan pemerintah daerah (*Top-Down*). Masyarakat berdasarkan kesepakatan lokal menetapkan aturan pengelolaan dengan memperhatikan kode etik atau norma dasar tersebut di atas. Pemerintah daerah bertugas untuk mengukuhkan aturan tersebut dan menjadi nara sumber agar aturan pengelolaan tersebut tidak bertentangan kepentingan nasional secara keseluruhan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).

Harapan dari Fish Snctuary itu sendiri awalnya adalah untuk menjaga dan mempertahankan stok sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan lestari, sehingga hasil dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang sampai dengan anak cucu. Fish sanctuary sendiri merupakan suatu usaha perlindungan sumberdaya alam laut yang dilakukan pemerintah bersama-sama masyarakat sekitar.

Laporan akhir FSP (2003), menyebutkan bahwa Pelaksanaan proyek perlindungan laut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembuatan Fish Sanctuary. Kegiatan tersebut meliputi :

1) validasi (potensi dan kondisi) lokasi *Fish Sanctuary*

Kegiatan validasi lokasi *Fish Sanctuary* merupakan kegiatan dalam usaha pemilihan daerah yang sesuai untuk pelaksanaan daerah perlindungan laut. Dalam kegiatan ini diperoleh 3 alternatif pilihan tempat, dimana tiga alternative tersebut adalah : 1) Pantai Pasir Putih, 2) PancerCengkong dan 3) Pantai Damas. Dimana ketiga tempat ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Untuk lokasi Pantai Pasir Putih dan Pantai Damas memiliki karakter habitat terumbu karang. Sedangkan Pancer Cengkong mempunyai ciri habitat hutan bakau dan muara sungai. Berdasarkan

berbagai pertumbuhan dan keadaan lokasi, maka Pantai Pasir Putih dianggap sebagai tempat yang paling cocok untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan laut.

2) Identifikasi dan analisis *Stakeholder*

Menurut laporan akhir Fish Sanctuary tahun (2002) *Stakeholder* utama Fish Sanctuary adalah pengguna sumberdaya pantai Prigi dan masyarakat maupun instansi terkait. Penentuan stakeholder utama akan sangat tergantung pada lokasi, jenis habitat dan jenis kegiatan serta status lokasi tersebut dari rencana fish sanctuary yang telah ditentukan bersama dengan masyarakat. Secara umum perwakilan stakeholder untuk fish sanctuary adalah: kelompok nelayan pancing, kelompok jarring titil dan blengker, pancing layur, payang, purse seine, PSBK, PPNS, WASDI, instansi DKP, penyuluh, PT. PTB, dan Dinas Pariwisata, lingkungan hidup, Pertambangan dan energy. Masing-masing stakeholder dari perwakilan kelompok tersebut diidentifikasi dan dianalisis untuk mendapat gambaran dan informasi lapang yang akurat.

3) Sosialisasi Rencana *Fish Sanctuary*

Tujuan, manfaat, keuntungan, dan dampak pembentukan *Fish Sanctuary* di pantai Prigi disampaikan kepada masyarakat luas melalui *Stakeholder* terkait. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembuatan brosur singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Sosialisasi dilakukan kepada masing-masing kelompok nelayan terkait beserta komunitas lainnya. Kelompok nelayan terkait seperti jaring tarik, perahu tanpa motor, alat tradisional lainnya, pancing layur, payang, dan purse seine. Setiap kegiatan sosialisasi di syarkan untuk menyertakan partisipasi tenaga PPL lokal dan kelompok PSBK.

Pada kegiatan sosialisasi, disampaikan formulasi draft *Fish Sanctuary* termasuk pendekatan hukum formal. Setiap kelompok *stakeholder* diharapkan memberikan tanggapan berdasarkan pemahaman dan kepentingan masing-masing kelompok pengguna sumberdaya. Melalui pendekatan kombinasi *top down* dan *bottom-up planning* ini, tenaga ahli hukum yang tersedia diharapkan untuk membuat aturan kesepakatan penetapan pengaturan *Fish Sanctuary*.

Dari hasil sosialisasi yang pernah dilaksanakan sekarang sudah sebagian dapat dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap daerah perlindungan laut tersebut hal ini terbukti dengan masih adanya aktifitas dari sebagian masyarakat yang masih peduli terhadap daerah perlindungan laut yakni masyarakat berani melarang para pemancing yang sedang memancing ikan atau penangkapan ikan di daerah *Fish Sanctuary* tersebut, selain itu masyarakat juga mulai melakukan penanaman rumput laut walaupun dengan fasilitas seadanya. Akan tetapi sosiali terhadap wisatawan yang berada di pasir putih rata-rata mereka masih belum mengetahui adanya daerah perlindungan tersebut, namun mereka mengetahui arah dan manfaat dari daerah perlindungan laut tersebut.

Menurut hasil pengamatan dan obserfasi yang telah dilakukan oleh peneliti selama dilapang hal ini akan lebih baik jika sosialisasi ini dilakukan setiap tahun sekali supaya setiap kelompok dapat terfokus untuk merumuskan setiap elemen permasalahan yang timbul, dan setiap kelompok agar dapat mengevaluasi setiap hambatan dan kekurangan yang telah dihadapinya. Namun dikarenakan kesibukan dari kelompok-kelompok tersebut dengan pekerjaan tetapnya maka diantara kelompok ini terlalu mengesampingkan tugasnya tersebut.

4) Konsultasi *Stakeholder*

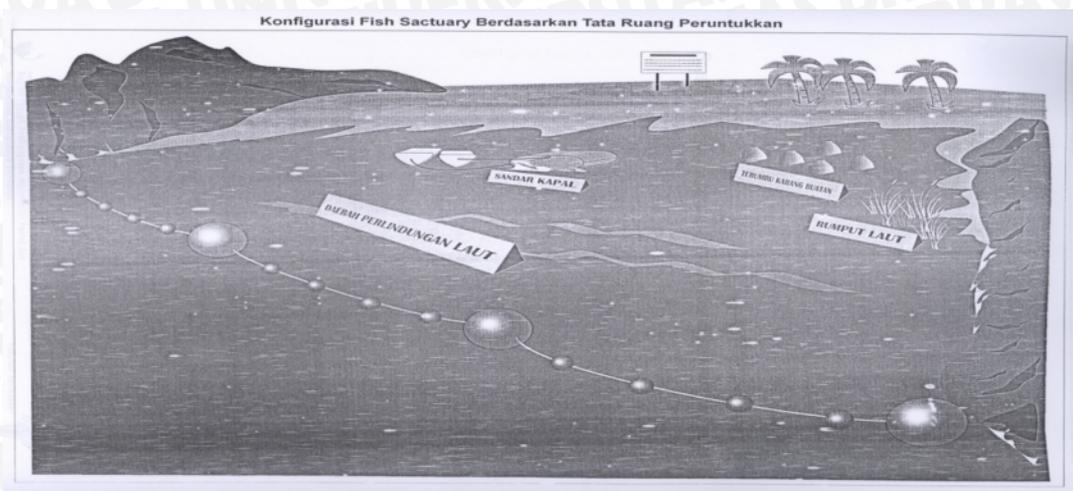
Aturan *Fish Sanctuary* dan penangkapan di pantai dibuat melalui konsultasi *Stakeholder*. Draft aturan dibuat berdasarkan pendekatan hukum positif dan hasil sosialisasi kepada masyarakat (bottom-up palaning). Hasil formulasi dikonsultasikan kepada masing-masing *Stakeholder* yang dianggap mewakili masing-masing kelompok masyarakat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, draft pengaturan tersebut mengandung informasi tentang : (1) definisi, (2) fungsi dan kegunaan *Fish Sanctuary*, (3) batasan area, (4) tanda batas area, (5) aturan pelanggaran/ pembatasan, (6) sanksi terhadap pelanggaran aturan, (7) mekanisme pengawasan, dan (8) gugus pengelola.

5) Lokakarya Masyarakat

Draft akhir penetapan dan pengaturan *Fish Sanctuary* kemudian dibahas secara bersama dari seluruh komponen *Stakeholder* perwakilan kelompok secara bersama. Draft akhir tersebut diharapkan bisa dijadikan kesepakatan bersama untuk pengaturan, dan penetapan *Fish Sanctuary* di Prigi.

6) Pemasangan Batas/Demarkasi *Fish Sanctuary*

Fish Sanctuary yang telah ditetapkan melalui kesepakatan dan aturan formal dibuatkan batas demarkasi yang jelas. Jenis maupun material pembatas ini haruslah disetujui bersama oleh masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekologis lingkungan perairan, menjadi tanda yang jelas, mudah dilihat, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat.



Gambar 2. Konfigurasi Fish sanctuary berdasarkan tata ruang peruntukkan

Untuk saat ini kondisi dari tali pembatas itu sendiri sudah rusak sehingga pelampung yang terikat pada tali mengumpul menjadi satu, hal ini dikarenakan terkena baling-baling dari prahu wisata dari masyarakat setempat. Seharusnya para pemilik prahu wisata menggunakan fasilitas yang telah disediakan yaitu seperti jembatan tempat pendaratan khusus prahu wisata, hal tidak dilakukan oleh pemilik perahu wisata dikarenakan tempat pendaratan terlalu jauh dengan aktifitas wisatawan serta jembatan untuk pendaratan itu sendiri juga telah rusak dan tidak bisa untuk digunakan pendaratan lagi.

7) Restocking dan Pengkayaan Habitat

Sebelum penetapan, lokasi *Fish Sanctuary* harus dilakukan stoking ikan dan pengkayaan habitat. Jenis dan jumlah ikan yang ditebar disesuaikan dengan jenis habitat pada lokasi *Fish Sanctuary*, bisa merangsang peningkatan stok di pantai, hasil musyawarah bersama dengan kelompok *Stakeholder*, benih tersedia secara masal terutama dari panti pembenihan terdekat, serta kemampuan anggaran yang telah ditetapkan. Selama belum berfungsi sebagai sumber penghasil pendapatan

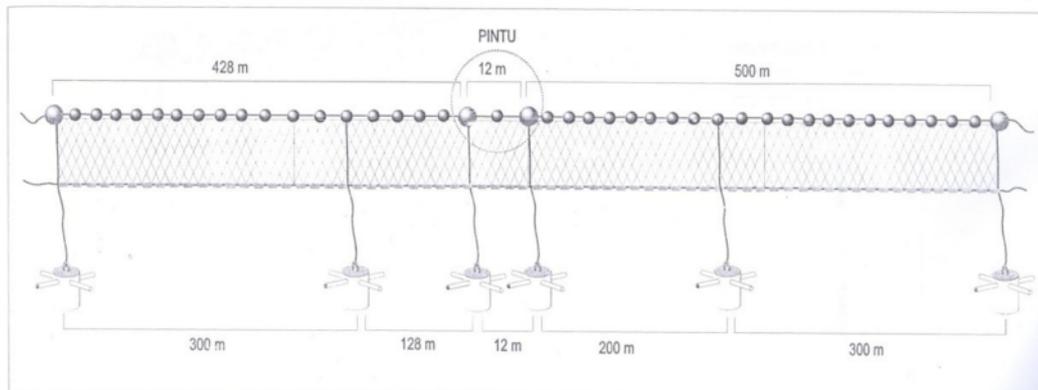
daerah (PAD) diharapkan adanya kegiatan restocking secara berkelanjutan. Sedangkan langkah berikutnya perlu dialokasikan dana untuk kegiatan restocking yang bersumber dari PAD yang berasal dari penerimaan kegiatan ini.

8) Pembentukan Gugus Pengelola

Tujuan dari pembentukan gugus pengelola dan pengawas adalah berdasarkan pada penetapan aturan *Fish Sanctuary* dan penangkapan dipantai. Tugas tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang sudah disepakati. Gugus pengelola itu sendiri terdiri dari unsure pemerintah (PPNS, WASDI, Dinas Kelautan dan Perikanan), PSBK, dan Perwakilan masyarakat lainnya. Sistem pengawasan ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari system yang telah ada selama ini dan dikenal dengan system SISWASMAS.

9) Penetapan *Fish Sanctuary*

Fish Sanctuary ditetapkan setelah dipasangnya semua pembatas yang jelas. Wilayah area *Fish Sanctuary* secara teknis dibatasi oleh tanda pembatas berupa pelampung yang dirangkai dengan menggunakan *wire rope* yang memisahkan wilayah tersebut dengan wilayah peruntukan lain di pantai. Dari aspek social lokasi maupun aturan pengelolaannya sudah disepakati oleh masyarakat dan dari sisi Yuridis ditandai dengan adanya surat keputusan baik dari bupati maupun Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Trenggalek.



Gambar 3. Kontruksi tali pembatas

5.1.1 Kondisi Fish Sanctuary Pasir Putih Saat ini (2010)

Setelah beberapa tahun Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP) berjalan pasti banyak sekali fasilitas yang telah lama atau sudah usang, yang seharusnya memerlukan perhatian secara rutin dari pengelola FSPP tersebut. Untuk lebih lengkapnya keadaan atau kondisi FSPP saat ini akan diuraikan lebih ringkas dibawah ini.

5.1.1.1 Kondisi Fisik Fish Sanctuary Pasir Putih

Untuk saat ini kondisi FSPP secara fisik banyak sekali mengalami perubahan, yaitu mulai dari pembatas yang dipasang sejak awal sekarang sudah tidak ada lagi, hal ini terjadi karena terkena baling-baling dari prahu wisata maupun dari perahu nelayan yang melintas tanpa melewati pintu yang disediakan.

Dermaga yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk mengoprasikan kapal wisata sudah memerlukan perbaikan, karena dermaga tersebut sudah tidak bisa dibuat untuk tempat berlabuh perahu wisata ataupun untuk digunakan wisatawan sebagai jembatan untk naik kekapal wisata.

Papan pengumuman memiliki peranan sangat penting sekali sebagai himbauan atau arahan terhadap masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ditempat tersebut, namun kondisi papan pengumuman yang terjadi saat ini adalah papan pengumuman tersebut sudah karatan dan susah untuk dibaca oleh pengunjung. Untuk kondisi FSPP secara visual dapat dilihat pada gambar 4 dan dilampiran.



Gambar 4. Papan pengumuman FSPP

5.1.1.2 Kondisi Habitat FSPP

Menurut Susilo, E (2007) terumbu karang dipasir putih masih terlihat di beberapa tempat tertentu diantara gundukan batu cadas dan pasir putih. Beberapa tempat terlihat padat danutupannya hampir 100%. Terumbu alami Nampak mulai pulih, walaupun di beberapa tempat terlihat telah mengalami pemutihan dan terendam lumpur, namun masih ada harapan kembali apabila sedimentasi, erosi dan limbah yang ada disekitarnya dapat dicegah. Sedangkan untuk biota ikan karang yang ada menurut pengelola gugus Fish Sanctuary yaitu kerapu, bendera, bago, kupon, dan teripang. Jenis ikan yang dominan ikan bendera dan kupon. Namun pada waktu dilakukan penyelaman jenis ikan sulit dikenali karena terganggu dan kondisi air yang keruh.

Dari uraian tentang kondisi habitat FSPP saat ini masih banyak sekali karang-karang yang secara alami mulai pulih lagi, serta banyaknya biota laut yang

menempati daerah perlindungan tersebut, namun hal ini akan dapat berlangsung lama dan dapat bermanfaat terhadap ekonomi masyarakat sekitar jika pihak-pihak yang berkepentingan turut serta untuk menjaga kelestarian ekosistem tersebut, maka sangat perlu sekali perhatian yang lebih dari pengelola maupun dari masyarakat sekitar supaya kelestarian sumberdaya laut dapat terus dilestarikan.

5.2 Partisipasi

Partisipasi sendiri secara etimologis kata “partisipasi” berasal dari bahasa latin *partisipare* yang artinya bagian atau turut serta. Pengertian pengertian partisipasi menurut sastropoetra (1988), adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 22/1999 menyatakan bahwa segala bentuk pemanfaatan sumberdaya harus mendapatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal (*Bottom-Up Planing*). Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan Pantai Prigi pada dasarnya harus dilakukan bersama secara dinamis antara masyarakat lokal (*Bottom-Up*) dengan pemerintah daerah (*Top-Down*). Masyarakat berdasarkan kesepakatan lokal menetapkan aturan pengelolaan dengan memperhatikan kode etik atau norma dasar tersebut.

Dalam Fish Sanctuary Patai Prigi yang terlibat dalam partisipasi itu sendiri meliputi masyarakat, wisatawan, serta pengelola yang terlibat langsung dengan kegiatan fish sanctuary, karena dari beberapa aspek tersebut adalah semua sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proyek fish sanctuary untuk kedepannya. Disini akan diuraikan dari masing-masing partisi tersebut.

5.2.1 Partisipasi Masyarakat

Dari proyek perlindungan laut ini partisipasi masyarakat juga dibutuhkan karena tujuan dari proyek ini adalah untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir serta dapat tetap terjaga kelestariannya sampai generasi yang akan datang. Awal dari partisipasi masyarakat ini timbul saat diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya daerah perlindungan laut yang dilakukan saat akan dilakukannya proyek perlindungan.

Partisipasi dari masyarakat yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat sekitar FSPP adalah mulai dari pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi pada daerah perlindungan laut, misalnya seperti memberi peringatan terhadap wisatawan atau masyarakat luar daerah karanggongso yang melakukan pelanggaran. selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari kepedulian masyarakat sekitar untuk tetap melestarikan sumberdaya perikanan seperti penanaman budidaya rumput laut.

Jadi dalam hal ini kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan penataan DPL (*Fish Sanctuary*) di Pantai Prigi. Masyarakat pantai Prigi memanfaatkan sumberdaya perikanan untuk alas an ekonomi, sosial, dan budaya. Tekanan penangkapan yang berlebihan dan merusak habitat sebagian besar disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu operasi penangkapan yang lebih baik akan menurunkan pengaruh tersebut jika didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi.

Seiring berjalannya waktu banyak sekali pelanggaran yang terjadi di daerah perlindungan laut tersebut, yang dilakukan oleh masyarakat luar Karanggongso

maupun masyarakat yang berasal dari Karanggongso itu sendiri. Dari berbagai pelanggaran tersebut peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan peringatan kepada pelangar tersebut. selain itu partisipasi masyarakat yang terjadi saat ini adalah adanya penanaman rumput laut yang dilakukan oleh salah satu masyarakat karanggongso yaitu Bapak Porwanto yang telah melakukan pembudidayaan rumput laut didaerah Fish Sanctuary, walaupun penanaman dilakukan dengan cara yang sederhana dan fasilitas yang kurang memadai hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Porwanto dilokasi Fish Sanctuary.

“Dulu pernah ada pengelolaan rumput laut dan sekarang saya memulai membibit untuk pengembangannya lagi, bibit yang saya tanam tidak dari Fish Sanctuary melainkan dari biaya saya sendiri”

Keterangan diatas dapat meuktikan bahwa masih adanya partisipasi masyarakat terhadap peningkatan sumberdaya laut. Namun hal ini juga sangat membutuhkan perhatian pemerintah karena dalam pengembangan budidaya tersebut masih banyak sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat agar keberhasilan yang dicapai bisa berjalan dengan optimal dan manfaat secara ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut. Adapun gambar dari pengelolaan rumput laut yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Budidaya Rumput Laut

Dari hasil wawancara kepada masyarakat sekitar sebenarnya masih banyak sekali yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan usaha tersebut, hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Purwanto selaku pembudidaya rumput laut.

“untuk saat ini yang dibutuhkan plampung, baju renang karena untuk melakukan usaha, plampung tersebut meliputi tali untuk pengembangan rumput laut”

Jika harapan-harapan dapat dipenuhi oleh pemerintah maka partisipasi tersebut akan berjalan dengan sinergis, dan partisipasi masyarakat terhadap Fish Sanctuary akan semakin tumbuh karena apa yang mereka kerjakan selalu dengan hasil yang optimal.

5.2.2 Partisipasi Wisatawan

Selain partisipasi masyarakat Fish Sanctuary juga sangat membutuhkan partisipasi dari wisatawan, hal ini dikarenakan lokasi Fish Sanctuary yang memiliki lokasi pada daerah wisata sehingga banyak sekali kegiatan wisatawan di daerah perlindungan tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan pada daerah perlindungan laut tersebut yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam hal ini partisipasi dari wisatawan yaitu berupa ikut menjaga kelestarian daerah perlindungan laut tanpa merusak maupun mengotori daerah larangan tersebut. Namun pada kenyataannya berdasarkan survey lapang belum ditemukan partisipasi dari wisatawan terhadap FSPP, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang sampai pada wisatawan.

Hal tersebut diatas terjadi dikarenakan papan pengumuman yang tersedia tentang aturan dan larangan terhadap daerah perlindungan yang terletak di tepi

pantai tersebut sudah karatan da tidak terlau jelas atau tidak ada daya tarik untuk dibaca atau diperhatikan oleh wisatawan yang berkunjung. Sudah seharusnya papan pengumuman tersebut diganti dengan yang baru dan yang lebih menarik serta penempatannya juga lebih strategis supaya dapat langsung dibaca atau dilihat oleh wisatawan yang berkunjung dipantai Pasir Putih. Padahal setiap tahun kunjungan wisatawan di Pantai Pasir Putih tersebut selalu mengalami peningkatan, jika papan peringatan tersebut tidak segera diganti maka akan semakin banyak peningkatan kerusakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap daerah perlindungan tersebut. Data wisatawan tersbut disajikan dalam tabel 5.

Dari hasil wawancara rata-rata dari orang yang diwawancarai semuanya tidak mengetahui tentang adanya daerah perlindungan laut tersebut akan tetapi wisatawan jika telah mengetahui adanya daerah perlindungan laut di Pantai Pasir Putih tersebut terdapat maka wisatawan juga mendukung untuk lebih meningkatkan usaha tersebut dengan cara menjaga dan mentaati aturan yang telah di tetapkan berdasarkan papan pengumuman yang telah dipasang.

Melihat kondisi seperti ini seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan maupun pihak pengelo Fish Sanctuary Pasir Putih seharusnya lebih sering melakukan kordinasi untuk mengevaluasi tentang kendala yang sering timbul akibat aktifitas wisatawan tersebut. Hal ini dilakukan karena salah satu tujuan dari Fish Sanctuary seprti yang telah terlampir dalam SK Bupati Trenggalek tentang pengesahan aturan pengelolaan daerah perlindungan laut (Fish Sanctuary) dipasir putih Teluk Prigi yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan pariwisata di pantai Prigi.

5.3 Mekanisme Kerja Kelembagaan Pengelola *Fish Sanctuary* Pasir Putih

Untuk menjamin pelaksanaan aturan *Fish Sanctuary* secara konsekuen perlu ditetapkannya petugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Dengan memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat, serta kewenangan pemerintah, maka kemudian disepakati suatu gugus pengelola *Fish Sanctuary* pasir putih yang anggotanya berjumlah 17 orang. Anggota Gugus pengelola terdiri dari perwakilan masyarakat lokal, kelompok PSBK Prigi – Lestari, unsur pemerintahan desa, kecamatan, KORAMIL, POLSEK, Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. System pengawasan ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari system yang telah ada selama ini dan dikenal dengan system SISWASMAS.

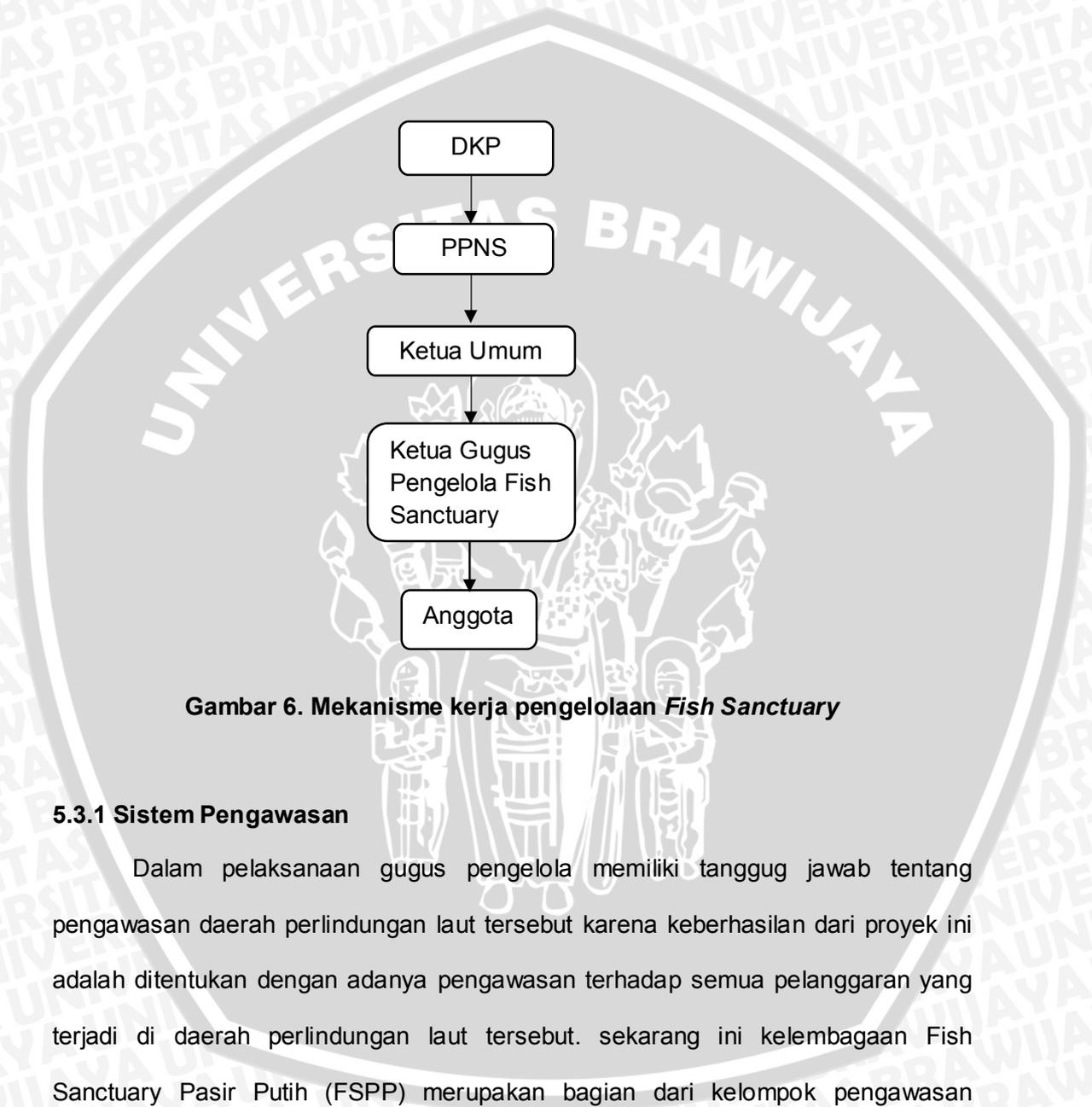
Berdasarkan surat hasil kesepakatan masyarakat Teluk Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 November 2001 yang membahas tentang pembentukan gugus pengelola Daerah Perlindungan Laut (*Fish Sanctuary*) disebutkan bahwa gugus pengelola Daerah Perlindungan Laut (*Fish Sanctuary*) pasir Putih dalam kesepakatannya bertugas untuk :

1. menerapkan dan menegakkan segala ketentuan yang tertuang dalam aturan kesepakatan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Pasir Putih Teluk Prigi.
2. Mencatat dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran aturan pengelolaan daerah perlindungan laut.
3. Mencatat identitas atau nomor KTP dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dan aturan Daerah Perlindungan Laut.

4. Memberikan penjelasan dan peringatan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali.
5. Menerapkan sanksi denda material kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran setelah melakukan peringatan.
6. Melaporkan kepada pihak berwajib jika melanggar tidak mengindahkan aturan kesepakatan pengelola Daerah Perlindungan Laut.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah daerah melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trnggalek.

Dalam menjalankan tugasnya gugus pengelola harus memperhatikan aspirasi positif yang berkembang di masyarakat serta seluruh ketentuan aturan pengelolaan daerah perlindungan laut, karena keberhasilan tugas gugus pengelola akan memberikan dampak pada perbaikan sumberdaya perikanan teluk Prigi dan pembelajaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan hukum serta norma yang berlaku secara lokal. Namun pada tataran operasional kondisi saat ini jauh dari harapan ideal, ditemukan fakta bahwa system pengelolaan masyarakat (siswasmas) tidak berjalan sebagaimana mestinya karena gugus pengelola yang telah disepakati masyarakat tidak dapat berperan secara maksimal, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung, status gugus pengelola yang bersifat sukarela (tanpa kotraprestasi), dan tindak lanjut dari dinas dan aparat terkait terutama berkenaan dengan penegakan hukum yang masih lemah. Masalah ini ditunjukkan dengan masih adanya aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun wistawan di wilayah Fish Sanctuary seperti pemancingan, dan pengambilan batu karang juga pasir. Secara umum mekanisme kerja selama ini

dilaksanakan dalam pengelolaan dan pengawasan *Fish Sanctuary*, adalah sebagai berikut :

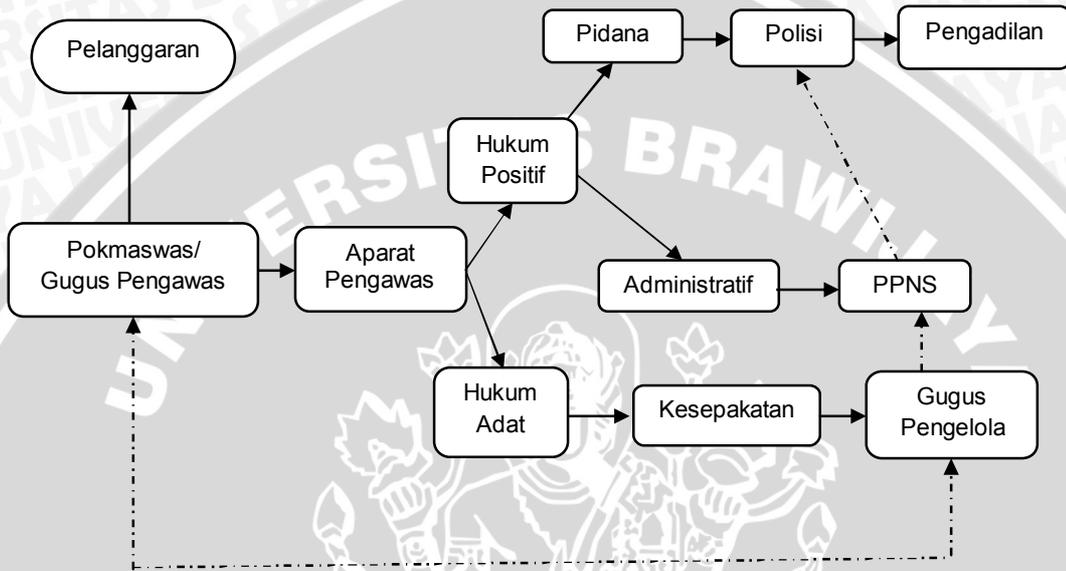


Gambar 6. Mekanisme kerja pengelolaan *Fish Sanctuary*

5.3.1 Sistem Pengawasan

Dalam pelaksanaan gugus pengelola memiliki tanggung jawab tentang pengawasan daerah perlindungan laut tersebut karena keberhasilan dari proyek ini adalah ditentukan dengan adanya pengawasan terhadap semua pelanggaran yang terjadi di daerah perlindungan laut tersebut. sekarang ini kelembagaan Fish Sanctuary Pasir Putih (FSPP) merupakan bagian dari kelompok pengawasan masyarakat (Pokmaswas) organisasi ini dibentuk karena anggota gugus tersebut merasa tidak puas dengan kinerja pengurus yang dibentuk oleh DKP dan beberapa

kali dikecewakan dengan program DKP tentang pengelolaan laut. Adapun system pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7. Garis besar prosedur pengawasan dan penyidikan pelanggaran sumber daya

Sumber: Susilo *et al.* 2008.

Sejalan dengan perhatian masyarakat pelanggaran sudah mulai berkurang walupun masih ada sedikit ada pelanggaran itupun dilakukan oleh pariwisata dan masyarakat dari luar daerah Karanggongso. Seharusnya dalam hal ini Dinas Pariwisata dan DKP Kabupaten Trenggalek selalu memberikan kontrol penuh terhadap Kelompok pengawas untuk tetap melakukan pengawasan terhadap daerah perlindungan tersebut hal ini sangat penting dilakukan karena supaya timbul kordinasi untuk mengevaluasi serta merencanakan pengelolaan sumberdaya perairan untuk kedepannya agar lebih baik lagi, selain itu nilai dan sikap dari pihak pengelola sendiri juga bisa menjadi penghambat jika kepedulian terhadap

sumberdaya lebih dikesampingkan dari pada kepentingan pribadi. Hal ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dalam lingkungan di mana masalah kemiskinan belum ditangani dengan baik dan teknologi yang tepat masih kurang, dalam hal ini seharusnya perlu dibentuknya sebuah Koperasi yang khusus menaungi Fish Sanctuary Pasir putih.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dari pengawasan pengelolaan sumberdaya perairan tersebut memiliki 3 poin utama yang harus diperbaiki terlebih dahulu yaitu: (1) Kepemimpinan dan pemerintahan, (2) Nililai dan sikap dari masyarakat sekitar, dan (3) Kemiskinan. Jika ketiga hal pokok ini bisa segera diperbaiki maka pengelolaan dan pengawasan akan bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya akan secara cepat dirasakan oleh masyarakat.

5.3.2 Partisipasi Pengelola Fish Sanctuary Pasir Putih

Pentingnya partisipasi pengelola terhadap Fish Sanctuary Pantai Prigi dikarenakan pada draft aturan penataan daerah perlindungan laut Pasir Putih Prigi pada bab 3 telah disebutkan bahwa pengelola berfungsi dalam menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah demi keberlangsungan wilayah terlindung (*Fish Sanctuary*), selain itu kelompok pengelola bertugas untuk menjalankan dan mengmankan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat.

Partisipasi dari gugus pengelola tersebut mengacu pada kewajiban yang telah disesuaikan pada SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek No. 188.45/416/425.060/2002 antara lain adalah:

- 1) Menidak lanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut Pasir Putih Teluk Prigi. Akan tetapi berdasarkan dari hasil pengamatan lasung di lapang hal ini tidak ditemukan adanya

petugas atau pengelola yang mencatat setiap pelanggaran yang terjadi akan tetapi hanya sebatas diberi peringatan saja oleh pihak Pengelola.

2) Mencatat identitas atau nomor KTP dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dari aturan kesepakatan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Pasir Putih. Seperti pada poin nomer 1 hal ini juga belum diterapkan pada pelaku pelanggaran dikarenakan pelanggaran yang terjadi masih sebatas bias diberi peringatan saja.

3) Melaporkan kepada aparat pengawas terdekat seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol AIRUD atau Kepala Inspeksi Perikanan, jika pelanggar tidak mengindahkan aturan kesepakatan pengelolaan daerah perlindungan laut pasir putih. Pada poin ini partisipasi dari pihak pengelola sudah pernah terjadi yaitu seperti pengambilan pasir dari pantai, akan tetapi laporan tersebut biasa langsung diatasi oleh pihak Satpol AIRUD.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah Melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Dikarenakan ketidak efektifan mekanisme kerja Gugus Pengelola yang disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai jadwal kerja dari gugus pengelola, dan tidak adanya job description serta kordinasi yang kurang baik dari internal dan eksternal gugus pengelola. Hal ini mengakibatkan tidak adanya laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah daerah.

Dari keterangan diatas partisipasi pengelola merupakan tolak ukur keberhasilan daerah perlindungan laut tersebut. jika partisipasi pengelola tersebut tidak ada maka proyek Fish Sanctuary Pantai Prigi belum bisa dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan partisipasi pengelola yang terjadi saat ini masih sangat bagus, yaitu dilihat dari masih banyaknya pengelola yang berada disekitar lokasi Fish Sanctuary yang memberikan himbauan maupun larangan terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan pelanggaran diarea daerah perlindungan laut tersebut.

Dari beberapa permasalahan di atas seharusnya setiap setahun sekali kelompok pengelola seharusnya mengadakan pertemuan untuk melakukan sebuah evaluasi yang kemudian dituankan kedalam sebuah laporan akhir tahunan yang kemudian nanti diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek supaya nanti dapat sebagai bahan acuan untuk pembangunan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

5.4 Unit Usaha Pada Fish Santuary Pasir Putih (FSPP)

Ada banyak sekali unit usaha ekonomi yang yang dijalankan oleh kelembagaan pengelola FSPP namun sampai saat ini masih ada beberapa usaha yang muali dilakukan kembali oleh salah satu dari kelompok pengelola yaitu usaha budidaya rumput laut, selain itu juga ada perahu wisata yang masih beroperasi, hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih pengelolaan atau dikarenakan adanya beberapa instansi teknis yang menaungi kawasan yang sama, hal ini menyebabkan kebingungan bagi warga sekitar untuk melakukan usaha yang pernah dijalankan tersebut.adapun beberapa usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perahu Wisata

Sedangkan kapal wisata yang digunakan saat ini masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kapal yang terlalu kecil dengan ukuran 90 cm x 9m, meskipun sering beberapa kali mengalami perbaikan. sedangkan kondisi mesinnya

sendiri juga sering rusak, hal ini akan membuat wisatawan yang tidak bisa berenang akan merasa takut untuk menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu tempat duduk yang tidak nyaman membuat akan membuat wisatawan ataupun pengunjung tidak tertarik untuk melakukan penyewaan kapal wisata tersebut.

Namun ketakutan wisatawan akan segera teratasi dengan direncanakannya adanya asuransi yang dapat menjamin keselamatan pengguna prahu wisata yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata terhadap para pengguna prahu wisata tersebut. Namun dari Dinas Pariwisata perlu membentuk kelompok prahu wisata lagi untuk sosialisasi asuransi tersebut.

Rincian pengelolaan dari kapal wisata tersebut adalah sebagai berikut :

20% untuk pembelian bahan bakar

40% untuk pengemudi kapal

40% untuk kas kelompok gugus FSPP

Dari setiap persewaan prahu biasanya dikenakan tarif sekitar Rp. 50.000/sewa, sedangkan untuk 1 bulan biasanya pengelola prahu wisata penyetorkan Rp. 100.000 untuk kas kelompok.

2. usaha budidaya rumput laut

Usaha budidaya rumput laut ini dilakukan oleh salah satu dari kelompok pengelola FSPP, namun budidaya tersebut masih bersifat percobaan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas untuk mengembangkan usaha tersebut serta dana dari penanaman rumput laut itu sendiri masih bersifat pribadi.



Gambar 8. Budidaya rumput laut

5.4.1 Usaha Yang Berpeluang Untuk Dikembangkan

Dapat dilihat dari ramainya pengunjung atau wisatawan yang berada di pasir putih setiap hari libur, maka sebenarnya masih banyak sekali peluang usaha yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, yaitu meliputi :

1. persewaan kapal wisata yang lebih nyaman

Hal ini merasa perlu dilakukan karena melihat kondisi kapal wisata yang beroperasi saat ini jauh dari keadaan nyaman. Namun dalam hal ini bukan berarti harus mengabaikan fasilitas yang pernah ada, akan tetapi kapal wisata yang tidak nyaman tersebut tetap digunakan namun hanya dioperasikan untuk aktifitas penelitian dan penyelaman atau sebagai sarana antar jemput bagi yang menggunakan fasilitas penyelaman.

2. persewaan banana boat

Agar Pantai Pasir Putih lebih memiliki daya tarik dalam hal hiburannya hal ini perlu dilakukan untuk bisa lebih menarik minat pengunjung yang datang di Pantai

Pasir Putih, dan lebih bisa memanfaatkan perahu wisata yang dulunya kurang member kenyamanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik banana boat tersebut.

3. persewaan pelampung doble

Hal ini dirasa perlu karena banyaknya anak-anak kecil yang belum bisa berenang dipantai, pelampung doble itu sendiri bertujuan supaya orang tua dapat mendampingi anak-anaknya saat berenang di pantai.

4. persewaan kaca mata selam

Salah satu obyek wisata di Pantai pasir putih adalah terdapatnya karang yang berada pada dasar laut. Agar hal ini dapat dapat dijangkau oleh pengunjung maka diperlukannya kaca mata selam untuk memfasilitasi pengunjung yang belum bisa melakukan diving.

5. souvenir dan oleh-oleh khas

Setiap kunjungan bisanya harus ada sebuah kenang-kenangan atau oleh-oleh dari tempat itu sendiri supaya cirri khas dari daerah tersebut mudah dirasakan oleh pengunjung tersebut. Seperti halnya di Pantai Pasir Putih masih dirasa perlu adanya sebuah cinder mata atau berupa oleh-oleh yang bisa dijadikan cirri khas daerah tersebut, misalnya sebuah kerajinan tangan tangan yang diproduksi oleh masyarakat sekitar, misalnya berupa makanan khas dari Pantai Pasir Putih, souvenir, serta kaos yang dibuat berdasarkan tema wisata Pantai Pasir Putih yang dapat diminati oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa.

6. Jasa photo keliling

Jasa foto keliling ini memfasilitasi bagi mereka yang tidak sempat membawa kamera dari rumah dan supaya setiap momen saat wisata di pantai Pasir Putih bisa diabadikan dan langsung dicetak.

Dari beberapa usaha yang perlu dikembangkan tersebut masih perlu naungan atau tempat untuk menaungi kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan supaya usaha tersebut bisa selalu tetap terorganisir. Alangkah baiknya jika kelembagaan pengelola FSPP membuat sebuah koperasi yang dapat menaungi usaha tersebut supaya dapat berjalan dengan seimbang. Diharapkan dari sebuah koperasi tersebut dapat lebih meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Pantai Pasir Putih tersebut.

5.4.2 Manfaat Fish Sanctuary

Pada dasarnya FSPP merupakan pembangunan daerah pesisir yang manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun oleh wisatawan. Hal ini sesuai dengan permasalahan pokok dibentuknya FSPP yaitu 1) isolasi sosial dan kemiskinan masyarakat perikanan pantai, 2) berkurangnya sumberdaya di sekitar pantai. Adapun manfaat FSPP bagi masyarakat sekitar serta wisatawan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat FSPP secara ekonomi bagi masyarakat sekitar khususnya nelayan yaitu untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Berdasarkan hasil produksi daerah penangkapan pada tabel 4 menunjukkan hasil tangkapan perikanan perairan prigi tahun 2009 mencapai angka tertinggi yaitu 12.779.162 Kg dibandingkan dengan hasil tangkapan pada perairan tulungagung yang hanya mencapai 9.551.374 kg. Namun perkembangan perikanan mulai tahun 2005-2009 masih belum menunjukkan

kesetabilan hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Dari peningkatan hasil penangkapan tersebut manfaat FSPP secara ekonomi bagi nelayan masih belum sepenuhnya dapat dirasakan. Sedangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar khususnya penyedia fasilitas wisata seperti Kapal wisata, serta pemilik warung. Dari salah satu pemilik kapal wisata yang diwawancarai mengaku manfaat ekonomi setelah dibentuknya FSPP sangat dirasakan, yaitu dengan bertambahnya pendapatan dari hasil kapal wisata, hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Sulani selaku pemilik kapal wisata.

” termasuknya ya ada pemasukan karena dulu tidak ada pemasukan dan sekarang mulai ada pemasukan”

Manfaat ekonomi bagi masyarakat khususnya penyedia fasilitas wisata saat ini selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan wisata yang datang di Pantai pasir putih yang setiap tahunnya selalu meningkat, tabel peningkatan wisatawan pantai pasir putih dapat dilihat pada tabel 5.

2. Manfaat bagi wisatawan

Keberadaan lokasi FSPP yang bertepatan dengan daerah wisata Pantai Pasir putih sangat berpengaruh bagi wisatawan yang berkunjung. Keaneka ragaman terumbu karang serta biota laut merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang datang di pantai Pasir Putih, namun hal tersebut hanya dapat dinikmati oleh wisatawan pada saat air laut surut saja.

5.5 Langkah Langkah Pengelolaan Selanjutnya

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan diatas Nampak jelas sekali bahwa keberadaan Fish Sanctuary Pasir Putih FSPP sangat berarti sekali bagi masyarakat sekitar misalnya untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat sekitar serta oleh wisatawan sebagai daya tarik wisata . Jadi FSPP perlu

adanya perbaikan dan pengembangan lagi supaya azas manfaatnya lebih terasa dimasyarakat sekitar. Namun terkendala dari pendanaan dari pemerintah yang pernah di ajukan oleh pihak DKP Kabupaten trenggalek belum kunjung turun, yang katanya dana tersebut digunakan untuk pengelolaan selanjutnya, hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yaitu Ibu Hartini yang diwawancarai ditempat kerjanya.

“kita sebetulnya setiap tahun mengusulkan untuk monitoring terumbu karangnya yang ada disitu, itu perawatannya kan membutuhkan biaya yang mahal ya. Itu dari pemerintah sampai sekarang belum. Kalau mengusulkan dana-dana seperti itu kayaknya terlalu sulit ya..”

Dari keterangan diatas langkah-langkah pengelolaan selanjutnya untuk pemeliharaan terumbu karang masih terkendala oleh dana yang diajukan oleh pihak DKP Trenggalek. Sedangkan untuk perbaikan sarana dan prasaran yang telah rusak masih belum ada anggaran untuk dana tersebut.

Adapun harapan dari masyarakat sekitar maupun pengelola untuk membentuk kelompok yang baru hal ini dikarenakan kelompok yang lama ada beberapa bagian orang yang sudah tidak kelihatan atau berdomisili lagi di Karanggongso. Hal ini seperti yang dituturkan oleh bapak Porwanto selaku kelompok pengelola FSPP.

“ harapannya itu dipantai pasir putih dibentuk kelompok sendiri, dan mengadakan iuran rutin perbulan nati ditotal pertahun ngumpul berapa itu dasebagian di gunakan untuk kepentingan Fish Sanctuary”

Dari uraian diatas jika dapat diterapkan atau dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk langkah-langkah pengelolaan selanjutnya maka hal ini akan dapat menjadi solusi yang terkait dengan masalah pendanaan atau biaya untuk pengelolaan sumberdaya laut.

Seiring dengan semakin langkanya sumberdaya ikan, insentif untuk konservasi sudah saatnya untuk ditingkatkan lagi, produksi benih ikan menjadi kunci pengkayaan stok agar produksi ikan yang mulai langka bisa terangkat kembali. Berkembangnya usaha berbasis kelompok seperti pengelolaan dan perdagangan ikan sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Namun berbagai upaya ini tentu sangat bergantung pada pemerintah, karena saat ini yang banyak memegang kendali tentang pengelolaan perikanan adalah pemerintah, sedangkan masyarakat hanya sebagai penggerak saja yang menjalankan amanat yang diberikan dari pemerintah untuk dijalankan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapang tentang evaluasi terhadap Fish Sanctuary Pasir Putih, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berangkat dari permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat pesisir mulai dari isolasi sosial dan kemiskinan masyarakat perikanan pantai serta, berkurangnya sumberdaya di sekitar pantai merupakan alasan terbentuknya Fish Sanctuary Pasir Putih. Yang kemudian hal ini dijalankan secara dinamis antara pemerintah serta masyarakat lokal yang telah disesuaikan dengan kesepakatan lokal serta aturan-aturan yang terkait. Sedangkan keadaan FSPP pada saat ini dilihat secara fisual banyak sekali fasilitas fisik yang sudah rusak sehingga perlunya perbaikan secara fisik, sedangkan kelembagaan FSPP pada saat ini perlu diadakannya pembentukan kelembagaan baru dikarenakan sudah mulai hilangnya keanggotaan dikarenakan perpindahan atau kesibukan pekerjaan.
2. Partisipasi masyarakat, dan wisatawan masih cukup baik walaupun ada masyarakat yang melakukan pelanggaran itupun adalah masyarakat dari luar daerah karanggongso, dan Partisipasi wisatawan yang berupa ikut menjaga kebersihan serta menjaga kelangsungan sumberdaya atau tidak merusak terumbu karang masih belum terlihat karena wisatawan belum banyak yang tahu tentang adanya Fish Sanctuary maka masih ada sedikit wisatawan yang

melakukan aktifitas disekitar area Fish Sanctuary yang mengabaikan asaz kelestarian tersebut.

3. Kondisi kelembagaan pengelola *Fish Sanctuary* saat ini jauh dari harapan ideal, ditemukan fakta bahwa system pengelolaan masyarakat (siswasmas) tidak berjalan sebagaimana mestinya karena gugus pengelola yang telah disepakati masyarakat tidak dapat berperan secara maksimal, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung, status gugus pengelola yang bersifat sukarela (tanpa kotraprestasi), dan dan tindak lanjut dari dinas dan aparat terkait terutama berkenaan dengan penegakan hukum yang masih lemah.
4. Unit usaha yang dimiliki fish sanctuary samapai saat ini yang masih berjalan yaitu mulai dari kapal wisata fish sanctuary dan budidaya rumput laut. Untuk perahu wisata prahu yang beroperasi ada tiga meskipun dengan keadaan yang kurang baik namun rencananya kedepan kapal wisata yang beroperasi di daerah pasir putih akan diberikan asuransi dari pihak pariwisata. Sedangkan untuk budidaya rumput laut hal ini baru saja dilakukan oleh satu masyarakat sekitar walaupun dengan fasilitas serta biaya yang terbatas.
5. Langkah-langkah dan harapan untuk pengelolaan selanjutnya masih terkendala dari keterbatasan biaya untuk pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan harapan dari masyarakat serta pengelola adalah inginnya dibentuk kelompok baru yang lebih berkonsentrasi terhadap *Fish Sanctuary*.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang di sampaikan, antara lain :

1. Untuk masyarakat serta wisatawan, perlu adanya kesadaran untuk lebih menjaga serta melestariakan sumberdaya laut. Karena untuk masyarakat Fish Sanctuary akan bermafaat untuk meningkatkan taraf ekonomi, serta akan menambah daya tarik wisata untuk wisatawan.
2. Untuk Gugus pengelola perlu adanya pembentukan kelompok baru yang lebih konsentrasi dan peduli terhadap Fish Sanctuary. Serta perlunya lembaga keuangan yang menaungi semua unit usaha yang ada di karanggongso, misalnya seperti koperasi.
3. Untuk pemerintah perlu adanya perhatian khusus sehingga Fish Sanctuary dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan, misalnya mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya sumberdaya perikanan untuk kedepannya, serta memperbaiki semua fasilitas yang sudah tidak layak .

DAFTAR PUSTAKA

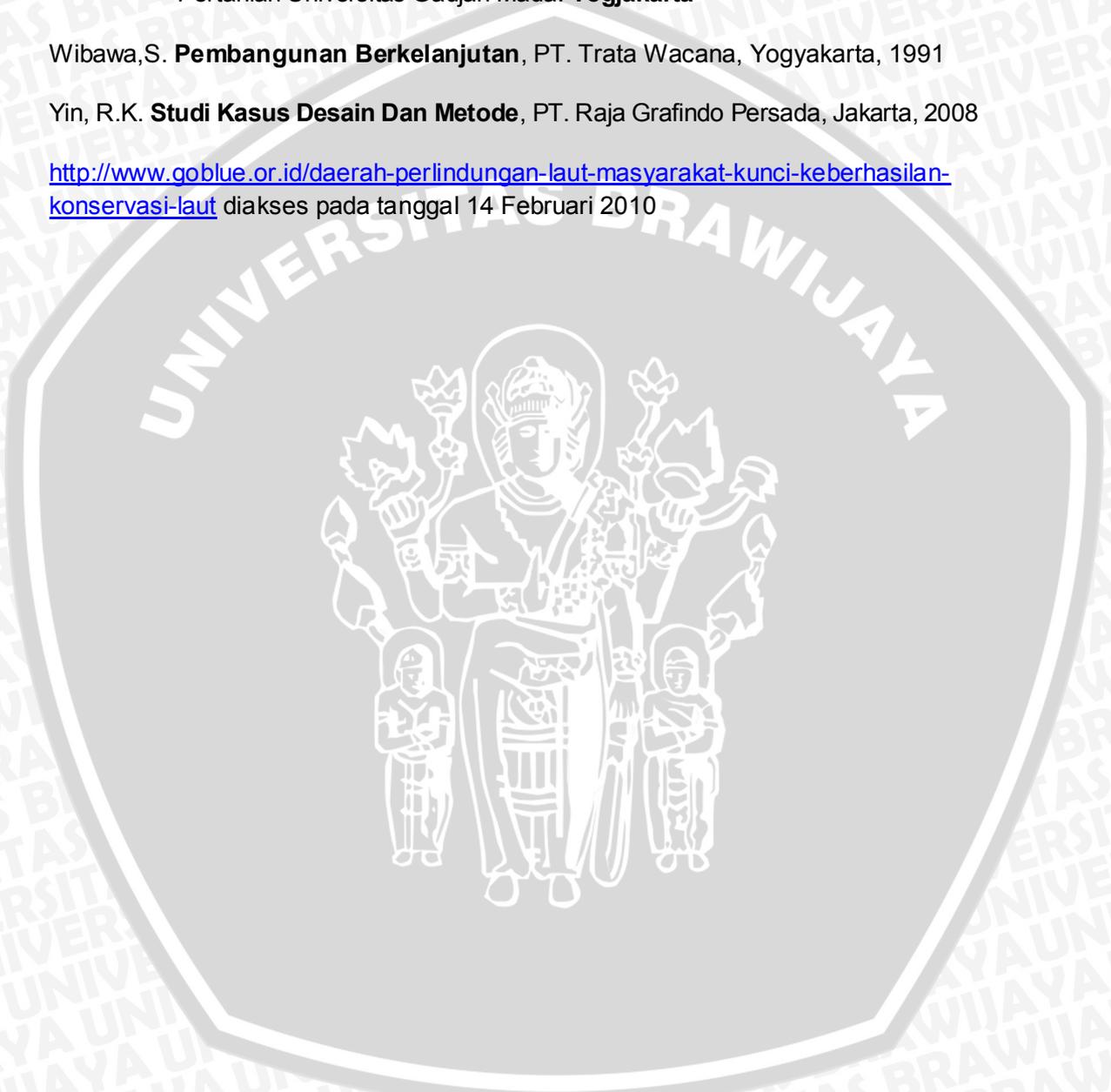
- Anonymous, 1997. **Estimasi Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Alam Laut Indonesia**, Puslitbangkan ,Deptan, Jakarta
- Arikunto, S. 2000. **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**. Edisi Revisi. Cetakan ke sepuluh. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Arikunto, Suharmini. Dr. 2006. **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**. Edisi Revisi. Cetakan ke sepuluh. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saifuddin, MA. 2000. **Metode Penelitian**. Pustaka Pelajaaar. Yogyakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2002. **Perikanan Sebagai Sektor Andalan Nasional (Kebijakan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan)**. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Jakarta
- Darwisito, S., *et all*. 2002. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Indonesia**. (*on line*) www.ipb.ac.id
- Diamark, S. 2000. **Kebijaksanaan Pengelolaan Kelautan**, SPL IPB.
- DKP, **Proyek Perkembangan LSM Dalam Rangka Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati TA. 2002**, Co-Fish Project Trenggalek, 2002
- DKP, **Penyempurnaan dan penataan fish sanctuary**, (tidak diterbitkan)
- Fauzi, A. **Kebijakan Perikanan Dan Kelautan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Kusandi. 2002. **Konflik Sosial Nelayan**. LKIS. Jogjakarta
- Sumanto. 1995. **Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan**, Andi offset. Yogyakarta.
- Susilo, Edi. 2008. **Daya Adaptasi Dan Jaminan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan Domestik (Dinamika Kelembagaan Lokal Pengelola Sumberdaya Perikanan Kawasan Pesisir)**. Ristek Universitas Brawijaya, Malang

Susilo, Edi, *et all* 2008. **Daya Adaptasi Dan Jaminan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan Domestik (Dinamika Kelembagaan Lokal Pengelola Sumberdaya Perikanan Kawasan Pesisir)**. Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan. Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. **Yogyakarta**

Wibawa,S. **Pembangunan Berkelanjutan**, PT. Trata Wacana, Yogyakarta, 1991

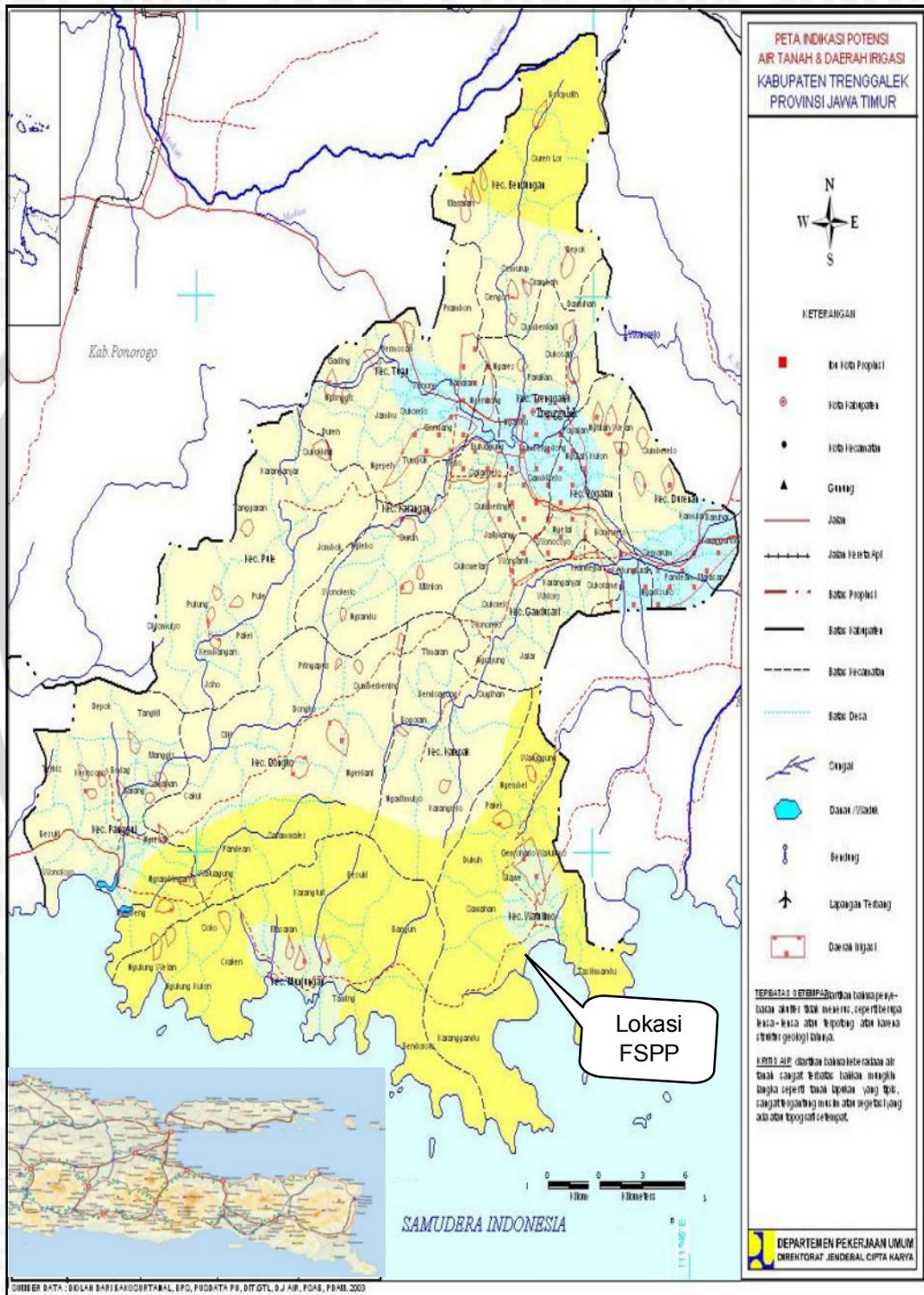
Yin, R.K. **Studi Kasus Desain Dan Metode**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

<http://www.goblue.or.id/daerah-perlindungan-laut-masyarakat-kunci-keberhasilan-konservasi-laut> diakses pada tanggal 14 Februari 2010



Lampiran 1.

Lokasi Fish Sanctuary Pasir Putih (FSP)



Lampiran 2.

Foto udara Pantai Prigi

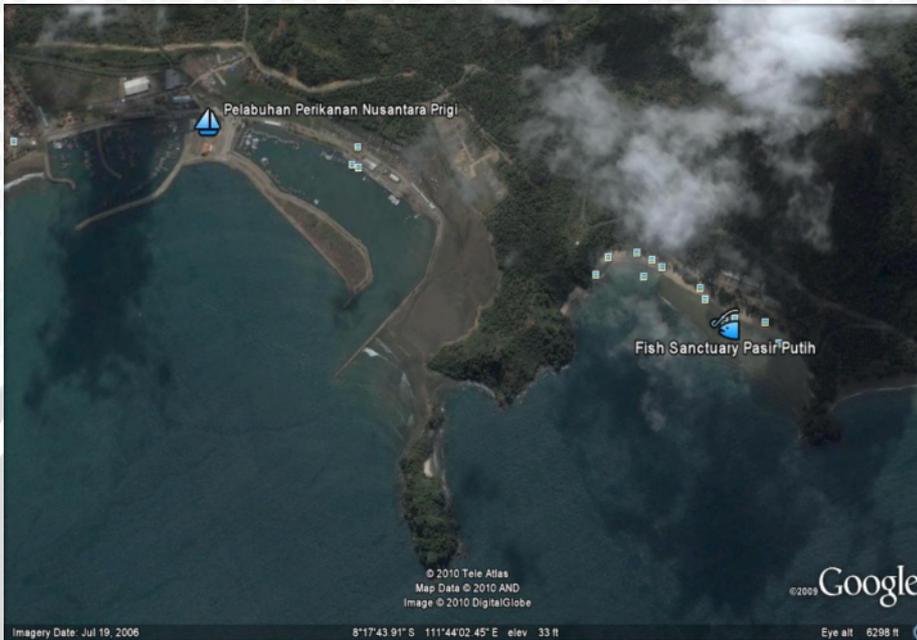
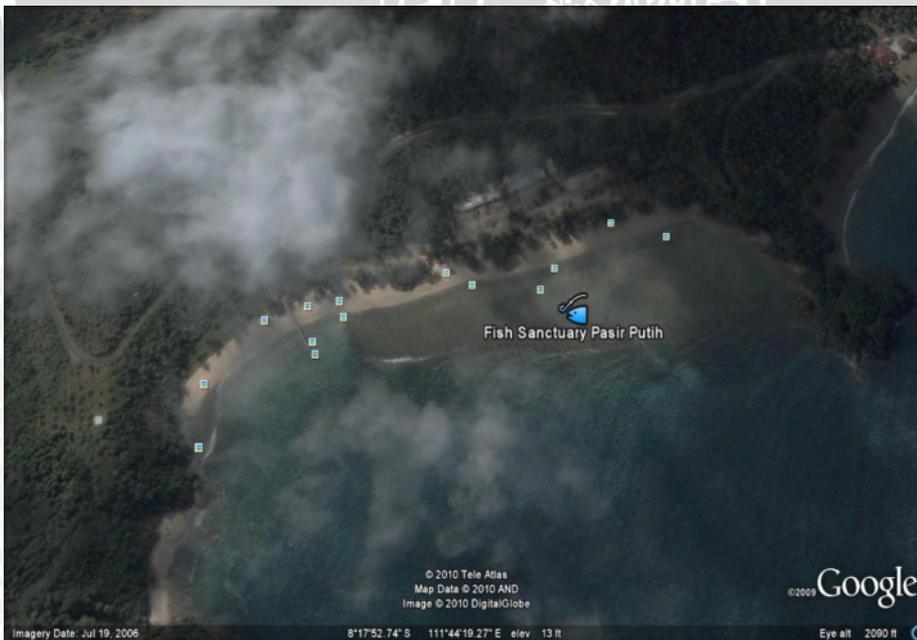


Foto Udara FSPP



Lampiran 3.

Keadaan FSPP Secara Visual



Lampiran 4.

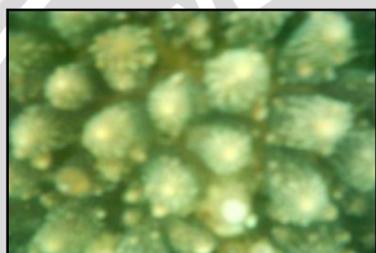
Kondisi Biota Laut



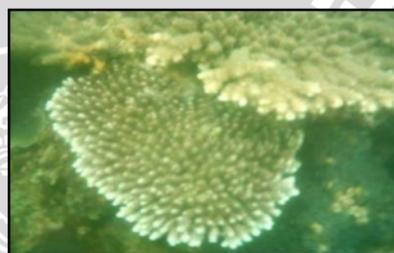
Kima (*Giant Tridacna*)



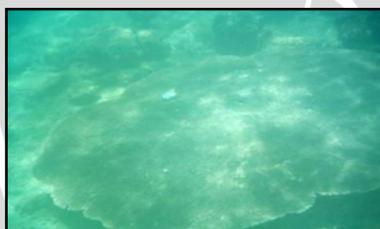
Platygyra sp



Acropora variabilis



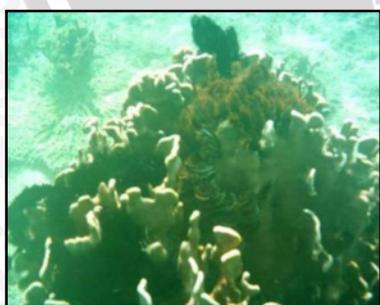
Distichopora violacea, *Acropora pulchra*



Acropora tabulate



Montipora foliosa, *Acropora pulchra*



Acropora palifera



Acropora Branching

Sumber :Riset Susilo, Edi. et al